



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

TESIS



HENDRA
08 212 06 036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh : HENDRA

(dibawah bimbingan DR. Syafruddin Karimi, SE, MA dan DR. Werry Dartta Taifur, SE, MA)

Ringkasan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dan perlu diatasi. Temuan secara empiris dari beberapa peneliti menunjukkan berbagai hasil yang kontroversi terkait masalah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dianggap dapat menimbulkan ketegangan sosial dan situasi yang tidak kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dengan meningkatnya angka kemiskinan dapat merangsang kebijakan fiskal yang ekspansif untuk program-program sosial bagi orang miskin sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia, di pulau Sumatera dan Jawa. Data yang digunakan adalah data panel (*pooling data*) tingkat propinsi tahun 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, dan 2007. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan analisis regresi data panel dengan metode efek tetap (*fixed effects*). Sebagai variabel dependen yaitu pertumbuhan PDRB per kapita dan sebagai variabel independen bagian distribusi pendapatan 20% tinggi dan 40% sedang, indeks gini dan angka kemiskinan. Selain itu, juga dilakukan analisis secara deskriptif melalui eksplorasi data perkembangan variabel penelitian dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan arah pengaruh yang konsisten dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik analisis secara Nasional maupun secara pulau. Variabel kemiskinan (*Pov*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, baik secara nasional maupun di pulau Sumatera dan Jawa. Variabel distribusi pendapatan 40% sedang (*Middle*) juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, akan tetapi hanya signifikan pada analisis secara Nasional dan pulau Sumatera. Variabel indeks gini dan distribusi pendapatan 20% tinggi (*Incs*) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, baik secara Nasional maupun di pulau Sumatera dan Jawa.

Terkait dengan hasil penelitian diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif bagi golongan penduduk berpendapatan tinggi

untuk berinvestasi. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan tersebut disamping meningkatkan kebijakan yang sudah ada seperti program-program pemberdayaan masyarakat miskin yang tergabung dalam PNPM-Mandiri, ke depan perlu adanya kebijakan yang menjamin perolehan pendapatan bagi penduduk miskin. Misalnya kebijakan pemberian tunjangan pendapatan bagi penduduk miskin dan atau rumah tangga miskin. Besarnya tunjangan tersebut minimal dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan diberikan dalam jangka waktu tertentu sehingga pada akhirnya diharapkan mereka dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mengingat penduduk miskin lebih banyak diperdesaan, kebijakan fiskal pemerintah perlu diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak diperdesaan. Misalnya kebijakan proyek-proyek padat karya di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dan agroindustri diperdesaan. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dari golongan penduduk berpendapatan tinggi dapat berupa pemberian kemudahan dalam perizinan investasi baru, berbagai insentif perpajakan (*tax holiday*), atau keringanan perpajakan baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Selain itu, pemerintah perlu mengarahkan agar investasi dari golongan kaya tersebut lebih banyak disektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya), terutama di bidang agroindustri diperdesaan.



**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN
KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI INDONESIA**

Oleh :

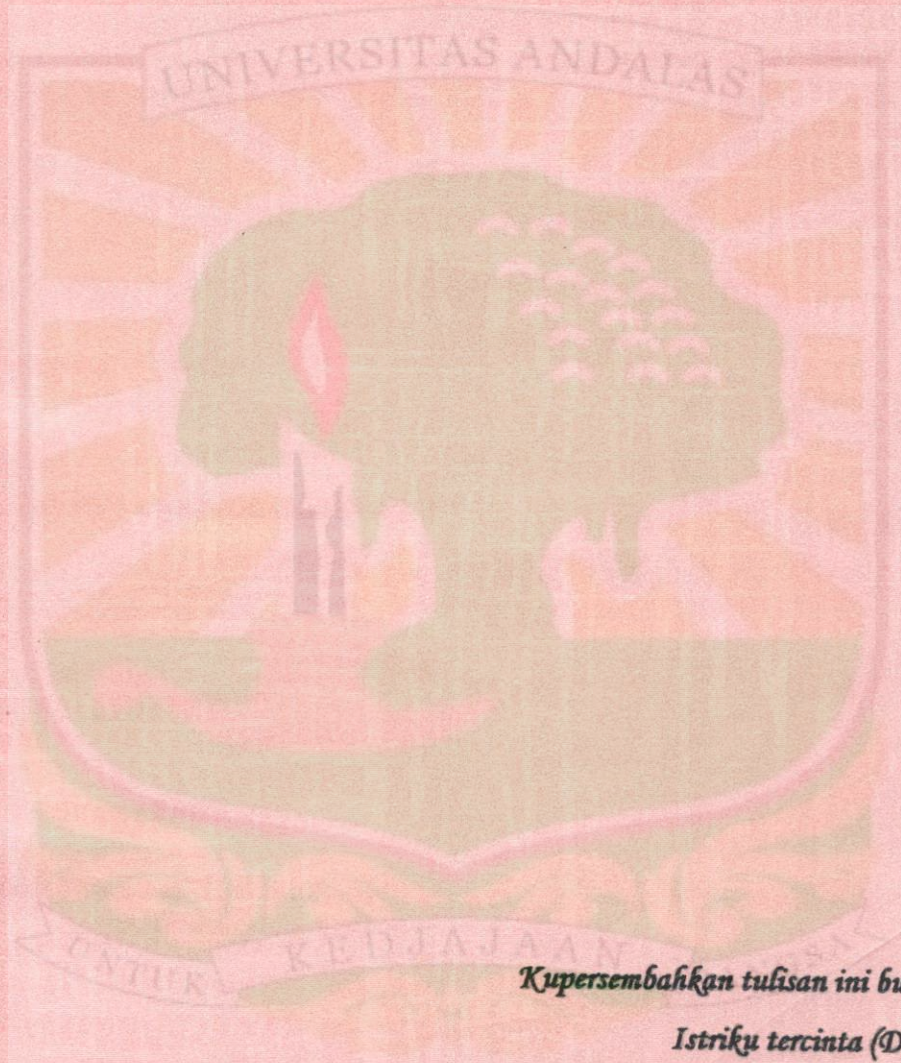
HENDRA
BP : 08 212 06 036

Tesis

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

"Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai, (mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain), Dan kepada Tuhanmu, berharaplah. (Q.S. 94 : 6 – 8)"



Kupersembahkan tulisan ini buat

*Istriku tercinta (Desi) &
anak-anakku tersayang (Manda dan Ihsan)*

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul :**"Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 13 November 2009

Yang Membuat Pernyataan



HENDRA



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang pada tanggal 31 Mei 1975 sebagai Putra pertama dari lima bersaudara dari Ayahanda Alamsyah dan Ibunda Syamsiar. Menikah dengan Desi Mitra, SP pada tanggal 29 Desember 2001 dan telah dikaruniai sepasang putri dan putra, Amanda Yashila Rahima (28 Desember 2002) dan Fatihul Ihsan (15 Juli 2005).

Menamatkan Sekolah Dasar tahun 1988 di SD 5/81 Padang Sarai, Kota Padang, SMP ditamatkan pada tahun 1991 di SMP Negeri 15 Padang, dan menamatkan SMA pada tahun 1994 di SMA Negeri 7 Padang. Pada tahun 1995 melanjutkan studi ke Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang pada Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan dan selesai 2 Oktober 1999.

Pada tanggal 1 Maret 2000, penulis diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung penulis ditugaskan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dan pada tanggal 17 April 2003 dimutasikan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Setelah itu, tanggal 1 Agustus 2008 penulis ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melanjutkan studi ke Program Studi Perencanaan Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas atas Beasiswa dari Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN) Bappenas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis aturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Jurusan Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung yang telah menugaskan penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang Pascasarjana Universitas Andalas;
2. Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Program Pascasarjana Universitas Andalas;
3. Bapak Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN) Bappenas yang telah memberikan beasiswa bagi penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Program Pascasarjana Universitas Andalas;
4. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Novirman Jamarun, M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;
5. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.E.DEA.Ing. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas;

6. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis;
7. Bapak Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
8. Bapak / Ibu Dosen Pengajar Program Studi Perencanaan Pembangunan (PPn) Tailor Made Angkatan ke-V 2008/2009 Pascasarjana Universitas Andalas;
9. Rekan-rekan PPn Tailor Made Angkatan ke-V 2008/2009 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan semangat kepada penulis;
10. Staf Sekretariat Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam melayani urusan akademik penulis dalam rangka menyelesaikan studi di Program PPn;
11. Teristimewa buat Ibunda Syamsiar dan Ayahanda Alamsyah, tanpa mereka penulis tidak mungkin meraih semua ini. Buat Papa dan Mama Mertua, atas jerih payahnya dalam mendukung penulis. Untuk istri tercinta, Desi Mitra, SP, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, pengertian, dan pengorbanan selama ini, dan untuk sepasang buah hati tersayang Amanda Yashila Rahima dan Fatihul Ihsan, terimakasih atas pengertian dan pengorbanan waktu bermainnya. Buat Adik-adik penulis, etek dan seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas dukungannya selama ini. Terimakasih buat kakak dan adik ipar semuanya, atas dukungannya buat penulis.

Penulis berharap semoga semua dukungan dan bantuan kepada penulis, dari berbagai pihak diatas dan pihak lainnya yang tak dapat disebutkan satu

persatu atau mungkin terlupakan oleh penulis tanpa disengaja, dapat menjadi amal ibadah yang tak terhingga nilainya disisi Allah, SWT. Amin!!!

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan kemajuan ilmu pengetahuan umumnya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan ekonomi khususnya, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini, terimakasih.

Padang, 13 November 2009

Penulis

HENDRA



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kemiskinan	6
2.1.1. Definisi Kemiskinan	6
2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	7
2.1.3. Ukuran Kemiskinan	9
2.1.4. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	10
2.2. Distribusi Pendapatan	12
2.2.1. Konsep Distribusi Pendapatan	12
2.2.2. Teori Distribusi Pendapatan	13
2.2.3. Ukuran Distribusi Pendapatan	14
2.2.4. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan	16
2.2.5. Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	17
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	19
2.3.1. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi	19

2.3.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.3.3. Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Pertumbuhan Ekonomi.....	31
2.4. Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Kerangka Pemikiran	33
3.2. Jenis dan Sumber Data	35
3.3. Keterbatasan Data	35
3.4. Pemilihan Model Penelitian	36
3.5. Metode Analisis	38
3.5.1. Analisis Deskriptif	38
3.5.2. Analisis Statistik	39
3.6. Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN	43
4.1. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per kapita	43
4.2. Perkembangan Distribusi Pendapatan	47
4.3. Perkembangan Kemiskinan	53
BAB V KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	62
5.1. Kebijakan Langsung dan Tidak Langsung	62
5.2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	67
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	80
6.1. Hasil Analisis Statistik	80
6.2. Uji Asumsi Klasik	85
6.3. Analisis dan Diskusi.....	87
BAB VII IMPLIKASI KEBIJAKAN	93

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	95
8.1. Kesimpulan	95
8.2. Saran	96
Daftar Pustaka	97
Lampiran.....	101



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
4.1. Perkembangan Pertumbuhan PDB Per kapita di Indonesia Keadaan Tahun 1993 – 2007	44
4.2. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Keadaan Tahun 1993- 2007	46
4.3. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Menurut Kriteria Bank Dunia Keadaan Tahun 1993 dan 2007.....	51
4.4. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Propinsi-Propinsi di Indonesia Menurut Kriteria Bank Dunia Keadaan Tahun 1993 Dan 2007.....	52
4.5. Perkembangan Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Keadaan Tahun 1976- 2007.....	55
4.6. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi-propinsi di Indonesia Keadaan Tahun 1993 Dan 2007	58
5.1. Cakupan Program IDT Selama 3 Tahun (1994/95-1996/97).....	71
5.2. Persyaratan KUR S/D Rp. 500 Juta	75
5.3. Persyaratan KUR Mikro S/D Rp. 5 Juta	75
5.4. Realisasi Penyaluran KUR Nasional Per Mei 2008	76
6.1. Hasil Regresi Untuk Pertumbuhan PDRB Per kapita 26 Propinsi di Indonesia	81
6.2. Hasil Regresi Untuk Pertumbuhan PDRB Per kapita 8 Propinsi di Pulau Sumatera	82
6.3. Hasil Regresi Untuk Pertumbuhan PDRB Per kapita 5 Propinsi di Pulau Jawa	83
6.4. Hasil Perhitungan Uji F	84

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1. <i>Dimensions Powerlessness and Ill-being</i>	6
2.2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.3. Sub Saluran Ketimpangan Pendapatan dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	18
2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.....	26
2.5. Kerangka Pemikiran dan Analisis	34
4.1. Perkembangan Indeks Gini di Indonesia Keadaan Tahun 1993 dan 2007	47
4.2. Perkembangan Indeks Gini Propinsi-Propinsi di Indonesia Keadaan Tahun 1993 dan 2007	50
4.3. Perbandingan Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Keadaan Tahun 1999 – 2007	57
6.1. Penentuan Letak Statistik Uji Durbin Watson	85
6.2. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Keadaan Tahun 2002 - 2007.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Hasil regresi data panel dengan metode <i>fixed effects</i> terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 26 Propinsi di Indonesia.	101
2.	Hasil regresi data panel dengan metode <i>fixed effects</i> terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 8 Propinsi di Pulau Sumatera.....	104
3.	Hasil regresi data panel dengan metode <i>fixed effects</i> terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 5 Propinsi di Pulau Jawa.	107
4.	Hasil Uji Multikolinieritas 26 propinsi di Indonesia	110
5.	Hasil Uji Multikolinieritas 8 propinsi di Pulau Sumatera	113
6.	Hasil Uji Multikolinieritas 5 propinsi di Pulau Jawa	116
7.	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park untuk 26 Propinsi di Indonesia..	119
8.	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park untuk 8 Propinsi di Pulau Sumatera	122
9.	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park untuk 5 Propinsi di Pulau Jawa	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan negara untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita, tetapi juga diukur dari keberhasilan usaha negara untuk mendistribusikan manfaat dari pertumbuhan tersebut secara lebih merata dan dapat mengurangi kemiskinan absolut. Menurut Adelman dan Yeldan (2000) ada beberapa unsur yang harus ada dalam pembangunan ekonomi : (1) adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) terjadinya perubahan struktural dalam pola produksi, (3) peningkatan kemajuan teknologi, (4) modernisasi dibidang sosial, politik dan kelembagaan, dan (5) meningkatnya kesejahteraan manusia.

Meskipun menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi, tetapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi permasalahan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, yaitu 16,58% atau sekitar 37,17 juta jiwa pada bulan Maret 2007, sedangkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan angka indeks gini 0,364 sudah dikategorikan *sedang*. Menurut Sigit (1997) adanya kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ditengah kemajuan ekonomi, akan membawa dampak sosial - politik yang justru sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan.

Selain itu, masih tingginya angka kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Karena hambatan yang paling erat dalam perkembangan suatu perekonomian adalah adanya kelangkaan modal. Sedangkan pembentukan modal yang diperlukan dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh adanya kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya suatu hubungan sebab akibat yang menurut Nurkse dalam Jhingan (2004) disebut sebagai "lingkaran setan kemiskinan". Jadi kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara, sehingga dapat melanggengkan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi.

Dari sisi temuan secara empiris, ada perbedaan pendapat mengenai pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kaldor (1956) dalam Yamamura (2008) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ketimpangan distribusi pendapatan bekerja melalui saluran akumulasi modal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan akumulasi modal menurut teori pertumbuhan neo-klasik merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Studi lainnya berdasarkan analisis panel data antar negara yang menggunakan indeks gini sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan membuktikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Forbes, 2000). Sebaliknya, beberapa peneliti lainnya menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat merusak atau menyebabkan pertumbuhan

ekonomi menjadi rendah (Alesina dan Perotti, 1993; Banerjee and Newman, 1993; Alesina dan Rodrik, 1994; Persson dan Tabellini, 1994).

Hubungan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Bhatta (2001). Ia melaporkan hubungan negatif, akan tetapi tidak signifikan antara kemiskinan dengan sektor pertumbuhan ekonomi di daerah metropolitan USA. Sedangkan menurut Mehanna (2004) bahwa dengan meningkatnya angka kemiskinan dapat merangsang kebijakan fiskal yang ekspansif untuk program-program sosial bagi orang miskin sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Dan kenyataannya di Indonesia, memang terjadi kenaikan anggaran pemerintah dari tahun ke tahun untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dapat diasumsikan menimbulkan situasi yang tidak kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dari sisi temuan secara empiris, pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menganalisis dan mengkaji bagaimanakah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan PDRB per kapita antar propinsi di Indonesia dengan asumsi mewakili kondisi secara nasional. Selain itu, karena kondisi ekonomi nasional tidaklah homogen, maka analisis dalam penelitian ini juga melihat pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita secara spesifik wilayah,

dengan pendekatan analisis per pulau besar di Indonesia. Mengingat keterbatasan data maka analisis secara pulau besar hanya dilakukan untuk pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ada tidaknya pengaruh dari ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita di Indonesia mempunyai implikasi terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia selama periode tahun 1993 – 2007?
- b. Bagaimanakah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di pulau Sumatera dan Jawa selama periode tahun 1993 – 2007?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia selama periode tahun 1993 – 2007;

- b. Menganalisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di pulau Sumatera dan Jawa selama periode tahun 1993 – 2007.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan, baik pada tingkat regional maupun nasional, terutama dalam hal mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan rujukan lebih lanjut untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk menganalisis, mengkaji tentang dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan dan variabel lainnya yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah, wilayah atau Negara.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk menganalisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita antar wilayah propinsi di Indonesia dengan periode analisis sejak tahun 1993 – 2007.

BAB II

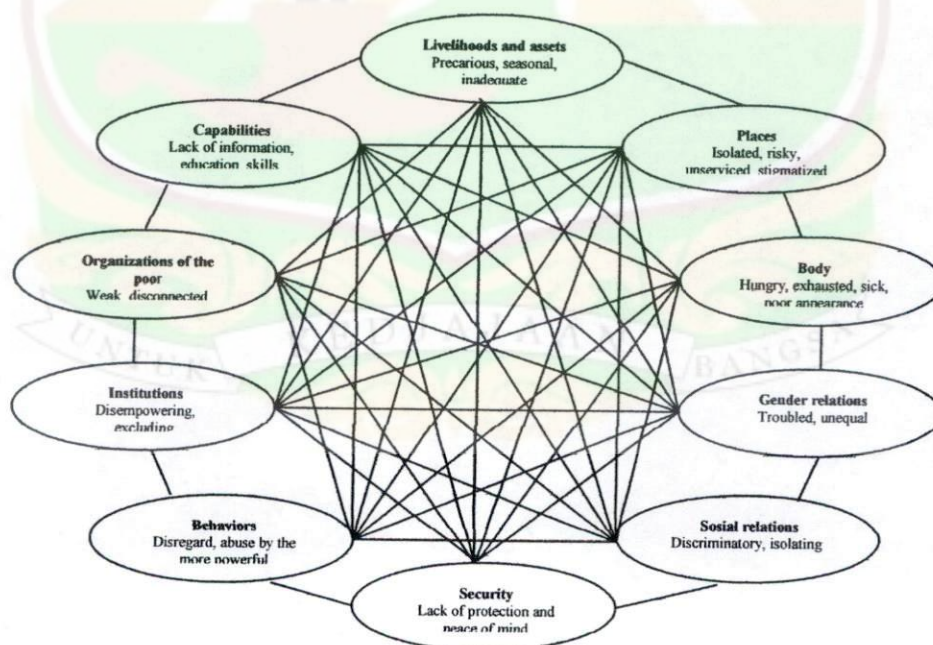
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan bersifat multidimensional, menurut Asian Development Bank, kemiskinan didefinisikan sebagai ketiadaan asset dan kesempatan yang dimiliki oleh orang miskin. Seharusnya setiap orang miskin dapat mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar. Narayan (2000) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan berhubungan dengan dimensi ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan ketidakbersuaraan (*voicelessness*). Ketidakberdayaan tersebut akibat dari proses multidimensi, yaitu perpaduan ketidakberuntungan yang bersambung satu sama lain (*interlocking disadvantages*) (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Dimensi *Powerlessness* and *Ill-being*¹



Sumber : Narayan (2000)

Ketika orang miskin berbicara tentang kesejahteraan, mereka sesungguhnya berbicara tentang dimensi material, sosial, fisik, psikologis, dan spritual. Dan juga mereka berbicara tentang perlindungan dan kebebasan dalam memilih dan bertindak. Kemiskinan juga berbeda karakteristiknya antara suatu tempat dengan tempat lainnya, antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya (Narayan, 2000).

Selain itu, menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002) dalam Media Indonesia (2009 : 10) bahwa masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam hal : (a) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic needs*), (b) melakukan kegiatan produktif (*unproductiveness*), (c) menjangkau akses sosial dan ekonomi (*inaccessibility*), (d) menentukan nasib sendiri dan diskriminatif, mempunyai rasa ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*), dan (e) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Dari definisi kemiskinan terlihat bahwa banyak faktor dan pendekatan yang digunakan sehingga menyebabkan seseorang atau individu dapat disebut miskin, baik miskin secara absolut, miskin relatif, miskin secara alami ataupun miskin karena buatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat ditinjau dari segi makro dan mikro, dan pendekatannya bisa dari faktor ekonomi, sumberdaya manusia, dan sosial budaya. Namun, pendekatan dari faktor ekonomi dan sumberdaya manusia lebih sering digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Ditinjau dari segi makro, kemiskinan disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Yaitu strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak dibarengi dengan pemerataan, pilihan pinjaman luar negeri untuk sumber pembiayaan dengan paket pola pembangunan dari donor yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumberdaya alam yang kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, tumbuh suburnya budaya materialistis, lemahnya *law enforcement*, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sistemik dan kronis dari aparat, *misleading* industrialisasi, politik pertanahan yang tidak adil, perencanaan pembangunan yang bersifat *top down*, pelaksanaan program yang berorientasi keproyekan, liberalisasi perekonomian yang terlalu dini tanpa persiapan yang memadai dan kebijakan pendukung yang kurang memperhatikan kelompok miskin (Dillon, 2004).

Selain itu, menurut Brata (2004) dari pendekatan ekonomi yang erat kaitannya dengan penyebab kemiskinan adalah (a) parahnya ketimpangan antara pendapatan dan kesejahteraan antara yang kaya dan miskin. Dalam kenyataan, memang masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan, (b) tingginya tingkat pengangguran, dan (c) situasi lingkungan, khususnya di perkotaan, seperti kurang memadainya akses pelayanan-pelayanan publik yang penting, sementara kota tersebut terus berkembang dan penduduknya semakin padat.

Secara mikro, menurut Sharp *et al* dalam Kusnanto (2002) apabila dilihat dari pendekatan ekonomi *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam

jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, pada gilirannya upahnya juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena pendidikan orang miskin yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Selain itu, Suharto (2005) menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Adanya pengaruh budaya ini cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural). Sedangkan menurut Kartasmita (1996) penyebab kemiskinan adalah (a) rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan diri dan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki, (b) rendahnya derajat kesehatan, sehingga menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa, (c) kondisi keterisolasian, dimana banyak penduduk miskin hidup terpencil dan terisolasi, sehingga sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

2.1.3. Ukuran Kemiskinan.

Sebelum krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, indikator kemiskinan diukur berdasarkan kebutuhan konsumsi makanan (*food poverty line*). Ukuran ini sama seperti yang digunakan Bank Dunia (1990) dalam mengukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan standar hidup absolut, yang berbeda

dengan ketimpangan yang merujuk kepada kebutuhan standar hidup relatif. Karenanya ukuran kemiskinan tersebut sangat rentan terhadap perubahan harga, apalagi saat terjadinya krisis, banyak orang yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan yang miskin semakin parah derajat kemiskinannya selama periode krisis tersebut (Dhanani dan Islam, 2002).

Dalam perkembangannya Bank Dunia mengukur kemiskinan berdasarkan ukuran pendapatan masyarakat, dimana pendapatan \$2 US sehari dikategorikan sebagai miskin dan \$1 US sehari dikategorikan sebagai sangat miskin. Termasuk Asian Development Bank juga menitikberatkan penggunaan ukuran pendapatan ini sebagai dasar untuk mengukur kemiskinan.

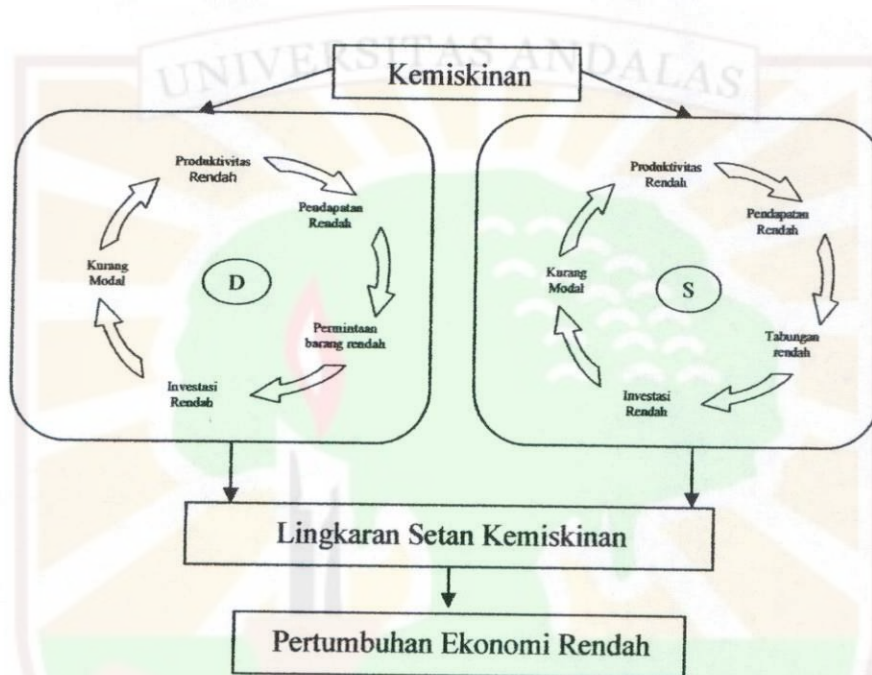
2.1.4. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi, terutama dinegara yang terbelakang dan negara yang sedang berkembang. Kemiskinan dapat menyebabkan keterbelakangan ekonomi suatu negara, dimana menurut Jhingan (2004) keterbelakangan ekonomi dapat berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, adanya berbagai faktor yang tidak *mobile*, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi.

Jadi dapat kita pahami, mengapa suatu negara terbelakang tetap sulit untuk bangkit dari keterbelakangannya, hal ini disebabkan karena ada hubungan yang melingkar, yang melanggengkan rendahnya tingkat pembangunan di negara seperti itu. Pembentukan modal yang diperlukan dalam proses pembangunan tidak akan tercapai karena banyak penduduk miskin yang produktivitasnya rendah,

pendapatannya rendah, tabungannya juga rendah, sehingga investasinya juga rendah dan kembali lagi menyebabkan tidak bisa mengakumulasi modal. Hubungan sebab-menyebab yang terkenal sebagai “*lingkaran setan kemiskinan*” tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah (Gambar 2.2).

Gambar 2.2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : diolah dari Jhingan (2004)

Lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain saling bereaksi sedemikian rupa. Menurut Nurkse dalam Jhingan (2004) bahwa kalau lingkaran setan kemiskinan tersebut dilihat dari sisi *permintaan (D)*, rendahnya pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang

rendah. Pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi yang rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah. Dengan demikian lengkaplah pula lingkaran setan tersebut kalau dilihat dari sisi *penawaran (S)*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik dilihat dari sisi kontribusi, partisipasi, dan peran masyarakat miskin itu sendiri dalam mendorong proses pertumbuhan ekonomi maupun adanya beban biaya bagi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, seperti program bantuan langsung tunai. Hal ini juga didukung oleh temuan Bhatta (2001) yang menyatakan bahwa kemiskinan berasosiasi negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita.

2.2. Distribusi Pendapatan

2.2.1. Konsep Distribusi Pendapatan

Menurut Nissanke dan Thorbecke (2006) paling tidak ada empat perbedaan konsep distribusi pendapatan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- a. *Konsep pertama*, mengukur perbedaan dalam pendapatan rata-rata antar negara (atau daerah). Konsep ini digunakan dalam menentukan tingkat perbedaan atau persamaan diantara negara atau daerah;
- b. *Konsep kedua*, rata-rata tertimbang pendapatan nasional (atau daerah) terhadap jumlah penduduk dari negara (daerah) tersebut. Dalam konteks ini, distribusi pendapatan akan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya negara (misalnya India dan China) dan daerah.

- c. *Konsep ketiga*, mengukur ketimpangan antar penduduk pada tingkat global, nasional, dan daerah. Pada tingkat global, konsep ini menghasilkan distribusi pendapatan dunia;
- d. *Konsep keempat*, adalah ketimpangan vertikal dan horizontal. Ketimpangan vertikal merujuk kepada ketimpangan antar individu dalam perbedaan piramida pendapatan, sedangkan ketimpangan horizontal merujuk kepada ketimpangan individu dalam besar pendapatan atau kelas sosial ekonomi yang sama.

2.2.2. Teori Distribusi Pendapatan

Dalam proses pembangunan, distribusi pendapatan berhubungan dengan pola pembagian pendapatan nasional diantara kelompok-kelompok masyarakat. Bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang merupakan indikator untuk menghitung penghasilan yang diterima oleh individu dan rumah tangga, tanpa mempermasalahkan dari mana sumbernya. Sebagai indikatornya adalah berapa pendapatan per kapita masyarakat. Namun sering dijumpai bahwa peningkatan pendapatan per kapita diiringi dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan.

Secara teori, menurut Brenner (1995) teori distribusi pendapatan dapat didefinisikan sebagai teori-teori yang membahas tentang mekanisme atau cara kerja distribusi pendapatan diantara kelompok-kelompok dan individu-individu dalam suatu perekonomian. Umumnya teori-teori distribusi pendapatan dapat dibedakan atas teori pendapatan fungsional dan teori distribusi pendapatan personal. Selain itu, distribusi pendapatan dapat digolongkan menjadi distribusi

pendapatan fungsional (balas jasa) dan distribusi pendapatan antar perorangan / kelompok dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Distribusi pendapatan fungsional

Konsep distribusi pendapatan fungsional ini berusaha menjelaskan pembagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, misalnya antara pendapatan yang diterima pekerja, pemilik modal dan kekayaan. Sehingga dapat diketahui besarnya pendapatan yang diperoleh dari bekerja (upah dan gaji) dan pendapatan yang diterima dari sewa, bunga dan dividen.

b. Distribusi pendapatan antar perorangan / kelompok

Pendekatan distribusi pendapatan antar perorangan / kelompok ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *distribusi pendapatan mutlak* dan *distribusi pendapatan relatif*. Konsep yang disebut pertama berkaitan dengan proporsi jumlah penduduk yang pendapatannya dapat mencapai suatu tingkat tertentu atau lebih kecil dari itu. Sedangkan konsep pendapatan relatif menunjukkan perbandingan pendapatan yang diterima oleh berbagai kelompok atau kelas penerima pendapatan.

Pembicaraan mengenai distribusi pendapatan ini lebih banyak berhubungan dengan konsep distribusi pendapatan relatif. Distribusi pendapatan relatif diperoleh dengan menggabungkan seluruh individu ke dalam skala pendapatan perorangan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan pengukuran atau jumlah pendapatan yang mereka terima.

2.2.3. Ukuran Distribusi Pendapatan

Ukuran-ukuran distribusi pendapatan relatif yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Bank Dunia

Kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dalam masyarakat berdasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 kelompok masyarakat. *Kelompok pertama*, bagian 40% dari jumlah penduduk berpendapatan rendah, *kelompok Kedua*, bagian 40% dari jumlah penduduk berpendapatan sedang, dan *kelompok ketiga*, bagian 20% dari jumlah penduduk berpendapatan tinggi.

Ukuran dari ketimpangan distribusi pendapatan berada pada 40% jumlah penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan dianggap *tinggi (high inequality)*, jika bagian 40% dari jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan nasional. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan dianggap sedang atau *moderat (moderate inequality)* jika bagian 40% dari jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan 12% - 17% dari total pendapatan nasional, dan ketimpangan distribusi pendapatan dianggap rendah (*low inequality*) jika bagian 40% dari jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sama atau lebih besar dari 17% dari total pendapatan nasional.

b. Indeks Gini

Menurut Newbery (1970) indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang didasarkan kepada kurva lorenz. Kurva lorenz digambarkan secara grafis untuk memperlihatkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dengan proporsi pendapatan yang mereka terima. Untuk menghitung indeks gini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fP_i * (Fc_i + Fc_{i-1}) \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

GR = indeks gini (*gini index*)

fP_i = frekuensi penduduk dalam kelas yang ke-i

Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran di dalam pengeluaran pada kelas pengeluaran yang ke-i

Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran di dalam kelas pengeluaran yang ke (i=1)

Nilai koefisien gini terletak antara 0 – 1, dan ukuran distribusi pendapatan dianggap sangat timpang jika indeks gini bernilai dari 0,5 – 0,7 dan seimbang jika indeks gini terletak antara 0,2 – 0,35.

2.2.4. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari beberapa studi menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh banyak faktor, seperti sistem pasar, kebijakan publik, preferensi rumah tangga, kondisi pasar, sumberdaya manusia, dan pertumbuhan kesempatan kerja (Burtless,1990; Becker,1991; Levy and Murnane, 1992; Rubin, *et al*, 2000 dalam Hailu *et al*, 2009), dan Kaasa (2005) telah mengidentifikasi sebanyak 24 faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan mengelompokkannya ke dalam 5 bagian, yaitu : faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, demografis, politik, budaya dan lingkungan, dan makroekonomi.

Sedangkan menurut Arsyad (1999) tidak meratanya distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh (a) adanya penambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) adanya ketimpangan pembangunan antar daerah; (c) terjadinya inflasi, dimana pendapatan nominal bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional

dengan kenaikan jumlah produksi barang dan jasa; (d) meningkatnya pengangguran, sebagai akibat banyak proyek-proyek investasi yang padat modal sehingga hanya persentase pendapatan modal yang bertambah bila dibandingkan dengan persentase pendapatan dari upah bekerja; (e) rendahnya mobilitas sosial; (f) adanya kebijakan substitusi impor yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang industri; dan (g) memburuknya nilai tukar (*term of trade*) antara negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.

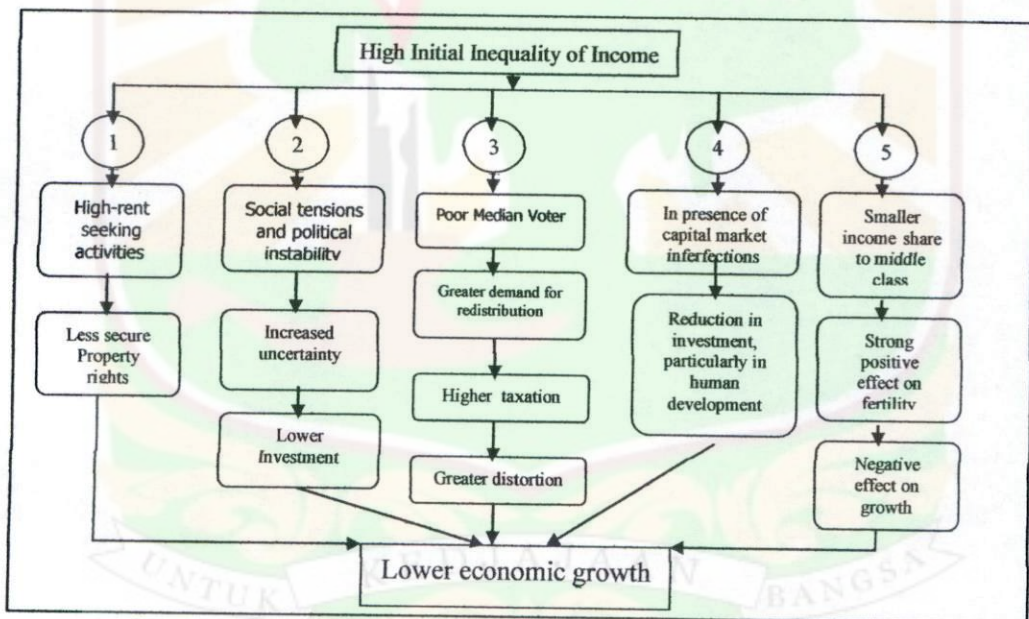
2.2.5. Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan dikalangan para peneliti. Secara teoritis, ada dua pandangan mengenai pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Pandangan pertama* menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini disampaikan pada awalnya oleh Kaldor (1956) sebagaimana dikutip oleh Yamamura (2008). Menurutnya ketimpangan distribusi pendapatan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bekerja melalui *saluran akumulasi modal*. Sedangkan menurut teori pertumbuhan neo-klasik, akumulasi modal merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Akumulasi modal yang tercipta, yang terkumpul melalui tabungan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena diasumsikan tabungan tersebut diinvestasikan kembali untuk menciptakan output. Dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, menyebabkan kecenderungan menabung yang berbeda antar golongan masyarakat. Masyarakat yang lebih kaya (golongan kapitalis) cenderung

menabung lebih banyak daripada golongan pekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan tabungan agregat (*agregat savings*) (Nissanke dan Thorbecke, 2006). Ini berarti meskipun pada awalnya ada ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, pada gilirannya akan terjadi *trickle down effect* dari golongan kaya ke golongan miskin. Golongan kaya mendistribusikan sebahagian pendapatannya melalui tabungan yang diinvestasikan, sehingga dampak investasi tersebut bisa juga dinikmati oleh golongan yang relatif miskin dan miskin absolut.

Gambar 2.3. Sub saluran yang dilalui ketimpangan distribusi pendapatan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ket : (1). Benhabib and Rustichini (1991), Keefer and Knack (2000); (2). Alesina and Perotti (1994); (3). Bertola (1993); Alesina and Rodrik (1994), Persson and Tabellini (1994); (4) Banerje and Newman (1993), Aghion and Bolton (1997); (5) Perotti (1996).



Sumber : Nissanke dan Thorbecke (2006)

Sebaliknya, Nissanke dan Thorbecke (2006) menyatakan bahwa teori-teori baru ekonomi politik (*new political economic theories*) menyebutkan bahwa

ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah (negatif) yang beroperasi melalui sejumlah sub saluran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Pada awalnya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi menyebabkan (1) ketidakproduktifan aktivitas “*rent-seeking*” sehingga menyebabkan berkurangnya keamanan hak kepemilikan, (2) meluasnya ketidakstabilan politik dan ketegangan sosial menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dan investasi menjadi rendah, (3) kebijakan redistribusi yang didorong oleh ketimpangan distribusi pendapatan berdampak terhadap beban disinsentif bagi orang kaya untuk berinvestasi dan mengakumulasi sumberdaya, (4) ketidaksempurnaan pasar kredit berimplikasi terhadap rendahnya investasi terhadap orang miskin, terutama pada modal manusia, dan (5) secara relatif bertambah kecilnya bagian pendapatan yang diterima kelas menengah -berimplikasi terhadap membesarnya ketimpangan – yang berpengaruh positif terhadap kesuburan, dan ini pada gilirannya secara signifikan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

2.3.1. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian hubungan antara dampak pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan atau sebaliknya dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan sebelumnya. Baik menggunakan data makro maupun data mikro, baik data silang tempat (*cross section*) maupun data runtun waktu (*time series*), baik antar Negara maupun dalam wilayah suatu Negara, perkotaan dan perdesaan. Variasi dan karakteristik hubungan dari kedua variabel tersebut sampai sekarang

masih menjadi perdebatan dan menjadi menarik untuk ditelusuri perkembangannya. Beberapa dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa menurut Bhatta (2001) kemiskinan berasosiasi negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Penelitian ini berdasarkan kompilasi data ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di MSA (*metropolitan statistical areas*) Amerika tahun 1980 dan 1990. Berlawanan dengan banyak temuan terbaru yang banyak berdasarkan regresi silang tempat antar Negara, hasil penelitian ini pada awalnya menunjukkan hubungan positif yang kuat antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita (PCPI) di metropolitan USA.

Pada sisi lain, angka kemiskinan di MSA, berasosiasi negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita (PCPI) di MSA. Tetapi hubungan ini secara statistik tidak signifikan pada beberapa regresi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di MSA dengan pertumbuhan pendapatan per kapita (PCPI) yang tinggi berakhir dengan periode ketimpangan dan kemiskinan yang menurun, karenanya menurut Bhatta (2001) mungkin ada perjalanan sebuah siklus pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Bigsten, *et al* (2003) telah menganalisa dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Ethiopia melalui analisis panel data tahun 1994-1997. Periode ini merupakan saat kondisi Ethiopia sedang dalam masa perbaikan ekonomi, dimana adanya situasi yang kondusif dan banyaknya peningkatan dalam manajemen makroekonomi yang dibantu dan diarahkan oleh IMF (*international monetary fund*).

Dalam menganalisis dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Ethiopia, Bigsten *et al* (2003) menggunakan kurva Lorenz dengan parameters *head-count* (H) dan *income gap ratios* (I) berturut-turut sebagai ukuran *prevalence* dan intensitas kemiskinan, sedangkan untuk mengukur kedalaman (keparahan) kemiskinan digunakan FGT index (Foster, Greer dan Thorbecke, 1984) yang direduksi dari H dan I tersebut. Untuk mengestimasi kesejahteraan rumah tangga didekati dari pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dan ukuran kemiskinan dari kebutuhan 2100 kkal/kapita/hari (*food poverty line*).

Analisis dilakukan terhadap hubungan pengeluaran per kapita dengan karakteristik rumah tangga pada skala mikro (rumah tangga) mencakup 3.000 sampel rumah tangga (1.500 perkotaan dan 1.500 perdesaan), dan dilanjutkan dengan estimasi probabilitas rumah tangga yang keluar masuk garis kemiskinan dari tahun 1994-1997. Terakhir analisis dilakukan untuk melihat perubahan kemiskinan ke dalam pertumbuhan dan redistribusi pendapatan. Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan dalam pendapatan rata-rata, sementara kurva Lorenz tetap, sedangkan redistribusi pendapatan didefinisikan sebagai perubahan dalam kurva Lorenz, sedangkan pendapatan rata-rata tetap (Bigsten *et al*, 2003)

Temuan Bigsten *et al* (2003) menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga yang menentukan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi adalah *kepemilikan lahan, pendidikan, tipe tanaman yang ditanam, pekerjaan di daerah perkotaan, rasio ketergantungan dan lokasi rumah tangga sampel*. Karakteristik rumah tangga seperti *ukuran rumah tangga* dan rasio ketergantungan diperdasaan dan perkotaan secara signifikan dan berefek negatif terhadap “permanent status” rumah tangga dibawah garis kemiskinan dan dampaknya juga sama terhadap

pergerakan rumah tangga keluar- masuk garis kemiskinan. Di daerah pedesaan, penanaman tanaman ekspor secara tradisional secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, pendidikan dasar juga memainkan peranan yang lebih penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di daerah perkotaan daripada pedesaan.

Hasil analisis terhadap perubahan dekomposisi kemiskinan ke dalam pertumbuhan dan redistribusi pendapatan menandai adanya bahwa pengurangan kemiskinan berkaitan erat dengan meningkatnya pendapatan riil per kapita sampai taraf tertentu yang kemudian dinetralkan karena pengaruh memburuknya distribusi pendapatan. Sebagai implikasi kebijakan dari hasil analisis ini diperlukan diskusi lebih lanjut untuk sebuah kebijakan yang pro-orang miskin (*pro-poor growth*) (Bigsten, *et al*, 2003)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Kim (1997) telah membuat perbandingan perbedaan di 5 kelompok wilayah dunia (Eropa Barat dan Amerika Utara, Eropa Pusat dan Selatan, Asia Timur, Sub Sahara Afrika dan Amerika Latin) dalam hal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ia menemukan bahwa terdapat perbedaan variasi yang sangat besar di ke 5 wilayah tersebut, baik distribusi pendapatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Asia Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat yang diiringi pemerataan pendapatan, sementara itu wilayah Eropa Pusat dan Selatan yang sedang dalam transisi ekonomi mengalami peningkatan dalam ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, sama halnya dengan negara-negara di wilayah Amerika Latin dan Sub Sahara Afrika.

Dengan analisa yang lebih fokus terhadap spesifik wilayah, secara umum faktor yang menentukan adanya perbedaan sebagaimana dimaksud di atas adalah perkembangan industrialisasi dan adanya wilayah yang sedang berkembang di dunia. Integrasi perekonomian wilayah dengan perekonomian global menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan ekonomi dan semakin memperjelas adanya perbedaan tersebut di atas (Kim, 1997)

Dalam konteks globalisasi ekonomi ini, perkembangan teknologi yang lebih cepat, menyebabkan meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan di banyak negara. Untuk yang terakhir ini, beberapa negara - kebanyakan Asia Timur - keadaannya jauh lebih baik. Karena mereka berbeda "*titik masuk*" dan strategi-nya dalam penyesuaian terhadap perekonomian global. Dan yang terpenting, pemerintah negara-negara di Asia Timur sangat memperhatikan stabilisasi makroekonomi dalam proses globalisasi ke depannya. Pemerintah (negara kawasan Asia Timur) secara spesifik bertujuan mengurangi kemiskinan dan menjamin perlindungan sosial sebagai dasar untuk pembangunan modal manusia (Kim, 1997)

Pada akhirnya, menurut Kim (1997), pertumbuhan ekonomi memang penting untuk mengurangi kemiskinan. Kesimpulan Kim menyatakan bahwa integrasi perekonomian suatu negara dengan pasar global dipengaruhi oleh strategi pembangunan negara tersebut, sama juga halnya dengan pengaruh lingkungan sosial budaya. Dalam konteks perekonomian global, strategi untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan secara spesifik bertujuan untuk membuat masyarakat yang kurang beruntung dapat berbagi dalam manfaat pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi harusnya diarahkan kepada sektor yang

dapat membuat orang miskin bisa berpartisipasi. Oleh sebab itu, negara harus memprioritaskan merestrukturisasi perekonomian untuk penyediaan lebih banyak sektor pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, dan penyesuaian sosial lainnya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka yang miskin.

Lebih jauh Khan (2000) mengeksplorasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Ia berpendapat bahwa adanya stabilitas makroekonomi, pasar yang kompetitif dan investasi publik di bidang fisik dan infrastruktur sosial secara luas merupakan hal penting yang dikehendaki untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di perdesaan. Selain itu, kebijakan publik seharusnya lebih fokus kepada isu terhadap akses orang miskin kepada lahan dan kredit, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, dan program transfer lainnya. Selanjutnya menurut Cashin *et al* (2001) kebijakan di bidang makroekonomi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini akan berasosiasi dengan meningkatnya indikator-indikator kesejahteraan sehingga membantu mengurangi kemiskinan.

Kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya adanya kepastian hukum, disiplin anggaran dan keterbukaan perdagangan internasional seharusnya menjadi fokus strategi untuk dapat sukses mengurangi kemiskinan (Dollar and Kraay, 2001). Sedangkan Pfefferman (2001) lebih menekankan kepada pentingnya peranan perusahaan swasta di Negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, peran perusahaan swasta (mikro, kecil dan menengah) secara positif berkontribusi terhadap pembangunan dan ini berimplikasi terhadap berkurangnya kemiskinan.

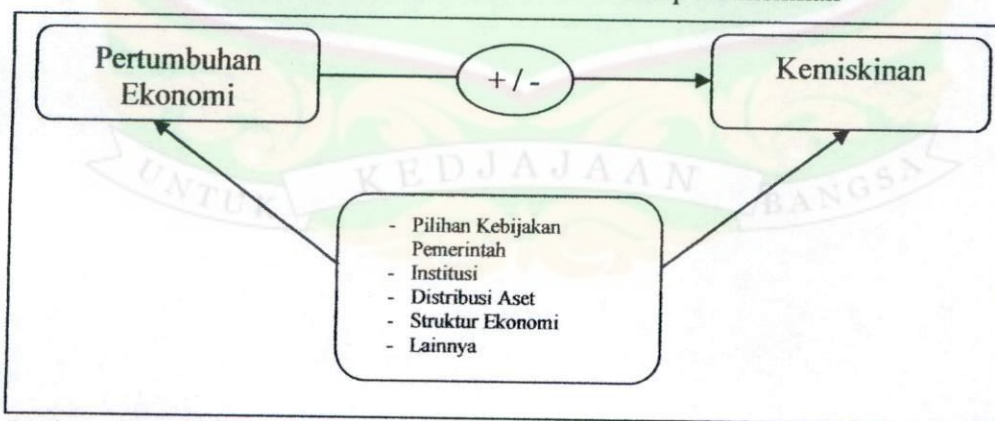
Selanjutnya Fritzen (2002) menunjukkan bahwa pada awal 1990-an, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Vietnam menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya reformasi kebijakan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik yang berlangsung di Vietnam. Agenda kebijakan reformasi difokuskan kepada menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan (*growth with equity*). Pertumbuhan dengan keadilan ini merupakan mesin utama yang mempercepat pengurangan kemiskinan dan karenanya ketimpangan semakin mengecil. Oleh sebab itu, jalan untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan tersebut sangat ditentukan oleh kemauan (*willingness*) stakeholders (kaum elit, teknokrat, pihak swasta, pimpinan pemerintah daerah, kementerian, kelompok masyarakat) yang berperan dalam mereformasi kebijakan ekonomi dan politik.

Determinan penting atau faktor kunci yang mempengaruhi terciptanya “*growth with equity*” di Vietnam adalah adanya reformasi kebijakan dibidang makroekonomi, reformasi struktural, pembangunan perdesaan, pembangunan sosial, keuangan publik, dan reformasi kelembagaan. Kesemuanya ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan ketimpangan yang rendah (membaiknya distribusi pendapatan) sehingga secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan di Vietnam. Jadi strategi “pertumbuhan yang berkeadilan” telah mengantarkan Vietnam sebagai negara yang berhasil dalam mereformasi kebijakan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan (Fritzen, 2002). Sedangkan Ravallion (2006) yang menguji hubungan meningkatnya volume perdagangan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan signifikan secara statistik

hubungan pertumbuhan ekonomi (trade share % of GDP) dan berkurangnya angka kemiskinan.

Sebagai kesimpulan, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan (berpengaruh positif) tetapi dapat juga meningkatkan angka kemiskinan (berpengaruh negatif). Menurut Werry (2005) hal ini disebabkan oleh berbagai variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Gambar 2.4). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan secara berarti, apabila pertumbuhan ekonomi tersebut memberi faedah yang terbesar kepada sekumpulan penduduk yang terbesar (Van Den Berg dalam Werry, 2005). Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan secara berarti adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan agihan pendapatan kepada kelompok penduduk miskin. Namun, apabila faedah pertumbuhan lebih banyak diterima oleh 20% kelompok penduduk berpendapatan tinggi, maka pertumbuhan tersebut hanya akan menghasilkan kelompok penduduk kaya bertambah kaya, dan kelompok penduduk miskin akan bertambah miskin.

Gambar 2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan



Sumber : Werry (2005)

2.3.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga sama kasusnya seperti hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Ada juga dua pandangan yang berbeda tentang hal ini.

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alesina dan Perotti (1993) menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh redistribusi fiskal yang berdampak pada pajak yang lebih tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Awalnya terjadi ketidakstabilan politik sebagai akibat distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga menimbulkan ketegangan sosial karena adanya golongan menengah yang kaya. Hal ini berdampak terhadap memburuknya investasi yang diikuti rendahnya pertumbuhan. Dengan kata lain, ketimpangan menyebabkan ketidakstabilan politik, ketidakstabilan politik berdampak terhadap investasi dan karenanya pertumbuhan rendah. Dengan menggunakan data silang tempat 70 negara selama periode 1960-1985 kedua hubungan tersebut signifikan secara statistik dan ekonomi.

Alesina dan Rodrik (1994) juga menganalisis hubungan antara politik dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu model pertumbuhan endogen yang sederhana dengan pembagian konflik antara pelaku-pelaku yang dibantu dengan berbagai macam bagian modal/tenaga kerja. Analisis menetapkan beberapa hasil berkenaan dengan faktor kepemilikan dari individu dan tingkatan perpajakan, redistribusi, dan pertumbuhan. Kebijakan memaksimalkan pertumbuhan hanya optimal untuk

pemerintah yang semata-mata perhatian tentang kapitalis murni. Hasil empirisnya menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan distribusi pendapatan berhubungan secara negatif dengan subsektor pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Perrson dan Tabellini (1994) juga melakukan penyelidikan tentang hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dengan pertanyaan : *apakah ketimpangan merusak atau membahayakan pertumbuhan?* Untuk menjawabnya, Perrson dan Tabellini (1994) kemudian mengumpulkan data dari berbagai negara dalam periode 20 tahunan. Model penelitiannya diturunkan dari penggabungan dua teori yaitu : teori pertumbuhan endogen dan teori kebijakan endogen dan menggunakan suatu model regresi untuk menyelidiki faktor ketimpangan antar negara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data yang dianalisis mencakup data secara historis 9 negara : yaitu Austria, Denmark, Finlandia, Jerman, Norwegia, Swedia, USA, Inggris, dan Belanda dan data silang tempat untuk periode sesudah perang dunia sebanyak 56 negara. Hasil temuan Perrson dan Tabellini (1994) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita (% GDP per kapita).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Perdebatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (diwakili pendapatan per kapita) dan ketimpangan distribusi pendapatan telah dimulai oleh Kuznets (1955) yang menyimpulkannya adanya pola hubungan “U terbalik” diantara keduanya dalam proses pembangunan. Kuznets berpendapat bahwa pada tahap

awal proses pembangunan ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin melebar dan ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin berkurang seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Hipotesis ini juga telah diuji oleh beberapa peneliti lainnya seperti Ahluwalia (1976). Pengujian Ahluwalia menggunakan data silang tempat 60 negara (40 negara berkembang, 14 negara maju, dan 6 negara sosialis). Dengan menggunakan model regresi, Ahluwalia menguji hipotesis kuznets berdasarkan variabel proporsi pendapatan yang diterima oleh masing-masing kuantil (kelompok) penduduk. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan serta melihat fakta-fakta pokok yang dapat digambarkan oleh model yang digunakan.

Model regresi yang digunakan berupa persamaan berganda dengan variabel terikat proporsi pendapatan penduduk dalam 3 kelompok (proporsi pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi), sedangkan variabel bebasnya pendapatan per kapita dalam bentuk logaritma (Ahluwalia, 1976)

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa hubungan antara bagian pendapatan (kuantil) dan logaritma pendapatan per kapita signifikan jika logaritma pendapatan per kapita dikuadratkan. Secara umum Ahluwalia (1976) tidak mendapatkan gambaran adanya fenomena "U terbalik" dalam proses pembangunan dari data negara yang dianalisis, tetapi paling tidak ia telah dapat memperlihatkan adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan dari data silang antar Negara.

Berbeda dengan Ahluwalia (1976) yang menggunakan pendekatan parametrik regresi, Frazer (2006) menggunakan pendekatan overlapping nonparametrik regresi untuk menyelidiki hipotesis fenomena “U terbalik” nya Kuznets (1955). Analisis overlapping nonparametrik regresi ini digunakan untuk mengestimasi simulasi hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan (dalam indeks gini) dengan GDP real per kapita, GDP real per kapita (dikuadratkan), $1/\text{GDP}$ real per kapita, kemudian dalam log (GDP real per kapita) dan log (GDP real per kapita). Selain itu, dalam persamaan overlapping nonparameterik regresi juga digunakan variabel kontrol seperti inflasi, persentase pengeluaran pemerintah terhadap GDP, urbanisasi, kepemilikan lahan per kapita, orang dewasa yang tamat sekolah, keterbukaan, dan “*finansial development*” untuk melihat bentuk fungsi dari keberadaan kurva Kuznets.

Data yang digunakan Frazer (2006) bersumber dari database ketimpangan distribusi pendapatan dunia tahun 2000 dan 2004 dari UNDP dan UNU/Wider terhadap data silang tempat antar negara dalam berbagai tingkatan pembangunan. Hasil temuan Frazer (2006) menunjukkan sedikit dukungan terhadap hipotesis Kuznets tersebut. Hanya pada penggunaan persamaan variabel bebas dalam log (GDP per kapita) yang telah dikuadratkan menunjukkan adanya hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan GDP per kapita berbentuk U terbalik setelah dibuatkan diagram pencarnya (*scatter plot*). Alasannya dalam hal ini, apakah sebuah negara dipertimbangkan mengikuti sebuah kurva Kuznets atau tidak, pertimbangannya tergantung pada pilihan dari format fungsional bentuk U untuk menguji hipotesis ini.

2.3.3. Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan telah banyak dilakukan penelitian secara terpisah. Terjadi pro dan kontra tentang dinamika hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, karena dari beberapa analisis empiris terdapat hubungan yang positif dan negatif diantara keduanya.

Namun, masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian hubungan ketiga variabel tersebut (kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan) dalam satu kerangka analisis seperti yang dilakukan oleh Mehanna (2004). Dengan menggunakan pendekatan ekonometrika memakai metode Johansen *co-integration* dan VAR (vektor autoregressive) model serta *Granger test*, Mehanna (2004) mengestimasi hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel tersebut dengan menambahkan variabel kejahatan ke dalam modelnya.

Data yang digunakan berupa data runtun waktu (*time series*) USA pada periode Januari 1959 s/d Agustus 2001 (511 observasi). Pertumbuhan ekonomi diukur dari pendapatan *disposable* real per kapita per bulan, kemiskinan diukur dari jumlah (dalam %) orang yang berada dibawah garis kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dari indeks gini, dan kejahatan diukur dari jumlah kejahatan yang dilaporkan ke kantor polisi. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mengurangi kemiskinan (Mehanna, 2004).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap awal peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan. Terutama disebabkan

karena meningkatnya variabel kejahatan. Dengan meningkatnya angka kemiskinan ini, dapat merangsang kebijakan fiskal yang ekspansif untuk program-program sosial bagi masyarakat miskin, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling mengejutkan adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dari indeks gini memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan variabel lainnya. Ini kemungkinan disebabkan tidak dapat diandalkan koefisien gini sebagai ukuran dari ketimpangan distribusi pendapatan. Dan penelitian terbaru lebih banyak menggunakan *indeks thile* dan *quintiles* (kuantil) daripada penggunaan indeks gini sebagai *proxy* untuk ketimpangan distribusi pendapatan yang mencakup variabel sosial, budaya, dan demografi (Mehanna, 2004).

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dimajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Diduga ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia selama periode tahun 1993 - 2007;
- b. Diduga kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia selama periode tahun 1993 - 2007.
- c. Diduga pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di pulau Sumatera dan Jawa selama periode tahun 1993 - 2007.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Dari uraian studi literatur dan beberapa kajian penelitian sebelumnya, terlihat bahwa dinamika hubungan antara kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan.. Di Indonesia, persoalan kemiskinan semakin hari semakin menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Bagi pemerintah, adanya beban anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang jumlah terus meningkat (ekspansi fiskal). Bagi masyarakat, persoalan ketimpangan distribusi pendapatan (kemiskinan relatif) dan kemiskinan absolut dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada situasi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan, tak terkecuali pembangunan ekonomi.

Bagaimana sebenarnya pengaruhnya kemiskinan ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?. Jika kita berasumsi bahwa ekspansi fiskal untuk menanggulangi kemiskinan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu saja keberadaan orang miskin berpengaruh positif bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, jika kita telaah lebih jauh bahwa masyarakat yang terjebak dalam jurang kemiskinan disebabkan karena mereka terperangkap dalam apa yang disebut sebagai "lingkaran setan kemiskinan". Maka dapat kita pahami bahwa kemiskinan ini menurut Jhingan (2004) dapat menghalangi suatu negara untuk mencapai kemajuan dan melanggengkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Artinya kemiskinan dapat membawa pengaruh negatif terhadap upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sementara disisi lain, Kuznets (1955) berhipotesa bahwa ada fenomena hubungan “U terbalik” antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan pada tahap awal pembangunan semakin melebar, sebagian besar kelompok penduduk hanya mendapatkan bagian pendapatan nasional yang rendah, sedangkan disisi lain sebagian kecil kelompok penduduk menerima bagian pendapatan nasional yang lebih besar. Sampai pada tahap tertentu pembangunan, maka ketimpangan distribusi pendapatan baru akan menurun. Namun dalam penelitian ini, akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang dikemukakan di atas, pada saat yang bersamaan diasumsikan berpengaruh terhadap usaha pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat positif maupun negatif. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan secara sederhana seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut ini :



Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran dan Analisis

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu :

- a. Data jumlah penduduk miskin tahun 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, dan 2007 seluruh propinsi di Indonesia.
- a. Data distribusi pendapatan penduduk tahun 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, dan 2007 seluruh propinsi di Indonesia
- b. Data PDRB per kapita dari tahun 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, dan 2007 seluruh propinsi di Indonesia.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lainnya yang telah mengumpulkan data yang sama sebelumnya, tetapi digunakan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian ini. Data dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dari berbagai tahun. Dipilihnya data pada tahun tersebut diatas karena data penduduk miskin dan distribusi pendapatan di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik hanya tersedia pada tahun tersebut.

3.3. Keterbatasan Data

Kadangkala dalam proses penelitian dihadapkan pada permasalahan keterbatasan data untuk menghasilkan sebuah model regresi yang baik. Bila estimasi regresi dilakukan secara runtun waktu (*time series*), jumlah pengamatan tidak mencukupi dan bila dilakukan secara silang tempat (*cross section*), jumlah observasi terlalu sedikit untuk menghasilkan estimasi parameter regresi secara baik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi keterbatasan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan data panel (*pooling data*).

Data panel (*pooling data*) yaitu penggabungan data runtun waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*). Keuntungan analisis menggunakan data panel dapat mengurangi terjadinya multikolinieritas antara variabel independen, karena model data panel (*pooling data*) dapat meningkatkan banyaknya jumlah observasi sehingga derajat bebasnya menjadi besar.

3.4. Pemilihan Model Penelitian

Persson dan Tabellini (1994) telah mencoba mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan (*income inequality*) terhadap pertumbuhan GDP riil per kapita. Variabel-variabel yang dianalisis seperti dalam model persamaan regresi (2) dan (3).

a. Model Persson dan Tabellini (1994)

$$\text{GDP} = \alpha + \beta_1 \text{Incsh} + \beta_2 \text{Nofran} + \beta_3 \text{School} + \beta_4 \text{GDP Gap} + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{GDP} = \alpha + \beta_1 \text{Middle} + \beta_2 \text{GDP Gap} + \beta_3 \text{PSchool} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

- GDP : Pertumbuhan GDP riil per kapita (%)
- Incsh : Distribusi pendapatan (bagian 20% dari penduduk berpendapatan tinggi)
- Middle : Distribusi pendapatan (bagian 40% dari penduduk berpendapatan sedang)
- Nofran : Partisipasi Politik, yang diukur dari bagian kelompok umur dan jenis kelamin yang berhak memilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya
- School : Partisipasi sekolah, diukur dari rata-rata tertimbang bagian (*shares*) dari kelompok umur yang masuk SD, SMP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.
- Pschool : Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)

GDP Gap : Ratio antara GDP riil Per kapita dan GDP riil per kapita tertinggi dalam sampel pada waktu yang sama

ε : error term (faktor gangguan)

b. Model Penelitian

Model Persson dan Tabellini (1994) tersebut diatas berdasarkan kepada dugaan bahwa variabel *distribusi pendapatan, partisipasi politik, partisipasi sekolah, dan GDP gap* mempengaruhi pertumbuhan GDP riil per kapita. Hasil temuannya menunjukkan bahwa variabel *Incsh, Middle, dan GDP gap* berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan GDP riil per kapita.

Oleh sebab itu, berdasarkan kerangka pemikiran penelitian dan *literature review* pada bab 2, diduga bahwa variabel distribusi pendapatan (Incsh dan Middle), variabel indeks gini, dan variabel kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Untuk menganalisis dugaan pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita tersebut digunakan model regresi linier data panel.. Sedangkan untuk membedakan satu objek (provinsi) dengan objek lainnya digunakan variabel semu (*dummy*). Sehingga model penelitian dapat dituliskan sebagai berikut :

$$LPDRB_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 Incsh_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \beta_3 d_{1i} + \dots + \beta_{28} d_{26i} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4)$$

$$LPDRB_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 Middle_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \beta_3 d_{1i} + \dots + \beta_{28} d_{26i} + \varepsilon_{it} \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (5)$$

$$LPDRB_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 Indeks\ Gini_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \beta_3 d_{1i} + \dots + \beta_{28} d_{26i} \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (6)$$

dimana :

β_{0i} : Konstanta; i = menunjukkan objek (provinsi)

$LPDRB_{it}$: Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%); i : menunjukkan objek;
t = waktu

- β_1 : Koefisien regresi variabel Incsh, Middle dan Indeks Gini
- β_2 : Koefisien regresi variabel Pov
- $Incsh_{it}$: Distribusi pendapatan (bagian 20% dari penduduk berpendapatan tinggi)
- $Middle_{it}$: Distribusi pendapatan (bagian 40% dari penduduk berpendapatan menengah)
- Pov_{it} : % Jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan
- $Indeks\ gini_{it}$: Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan
- $d_{1i} \dots d_{26i}$: Variabel semu, $d_{1i} = 1$ untuk objek pertama dan 0 untuk objek lainnya, demikian seterusnya sampai ke objek 26
- ε_{it} : error term (faktor gangguan)

3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif digunakan analisis deskriptif dan secara kuantitatif digunakan analisis ekonometrika dengan regresi linier data panel. Analisis tersebut secara lebih detail dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1. Analisis Deskriptif

Tujuan analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan data makroekonomi wilayah, perbandingannya antar wilayah dan nasional dalam melihat perkembangan / trend hubungan antara kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Analisis deskriptif juga digunakan untuk melihat perkembangan/trend dari waktu ke waktu perkembangan variabel penelitian pada tingkat regional dan nasional. Analisis dilakukan melalui eksplorasi terhadap data yang disajikan yang relevan dengan topik penelitian. Alat analisis deskriptif berupa grafik dan tabel-tabel analisis.

3.5.2. Analisis Statistik

Tujuan analisis statistik adalah untuk menjawab tujuan dan hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Melalui serangkaian uji statistik didapatkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian serta menolak atau menerima hipotesis terhadap variabel-variabel yang dianalisis, sehingga bisa dirumuskan implikasi kebijakan apa yang seharusnya dibuat dan disarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

Alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan metode efek tetap (*fixed effects*), yang berguna untuk menguji hubungan antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Metode efek tetap disini maksudnya adalah satu objek (provinsi), memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu dan juga koefisien regresinya, sehingga dapat diketahui perbedaan masing-masing daerah (antar objek). Selain itu, untuk menguji kebaikan model persamaan regresi yang digunakan, dilakukan uji statistik yaitu :

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel terikat. Yang diuji adalah apakah pengaruh koefisien regresi yang ditaksir dari model signifikan atau tidak terhadap variabel bebas. Hipotesa yang umum digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Artinya, berdasarkan data yang tersedia, akan dilakukan pengujian terhadap β_i (koefisien regresi populasi), apakah sama dengan nol, yang berarti tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti mempunyai pengaruh signifikan. Statistik uji dari uji t adalah $t_{hitung} = b_i / S(b_i)$, dimana nilai b_i adalah nilai dugaan dari β_i dan $S(b_i)$ adalah standar error dari b_i .

Penarikan kesimpulan dari uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari model yang diestimasi dan membandingkannya dengan nilai tabel distribusi t . Keputusannya adalah bila t_{hitung} besar dari $t_{\alpha/2}$, maka H_0 ditolak pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha) 100\%$, sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dari $t_{\alpha/2}$, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh variabel bebas ke- i terhadap variabel terikat.

b. Uji Serempak (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Ini dapat dilihat dari koefisien parameter yang didapat dari penaksiran model berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0, \text{ untuk suatu } i$$

Dimana statistik uji untuk uji F adalah : $F_{hitung} = \frac{\sum (\hat{Y}_i - Y)^2 / k}{\sum (Y_i - Y)^2 / (n - k - 1)}$

Nilai $\sum (\hat{Y}_i - Y)^2 / k$ adalah rata-rata kuadrat regresi sedangkan $\sum (Y_i - Y)^2 / (n - k - 1)$ adalah rata-rata kuadrat residual. Nilai F_{hitung} yang didapat dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F. Keputusannya adalah bila F_{hitung}

lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$ 100%, sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

c. Pengujian kesesuaian model (R^2)

Menurut Gujarati (1978), pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberartian model regresi yang digunakan. Arti dari nilai R^2 (koefisien determinasi) yang didapat menunjukkan seberapa besar bagian yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam persamaan regresi. Semakin besar nilai R^2 yang diperoleh semakin baik model persamaan regresi yang digunakan. Namun tidak ada ukuran yang jelas berapa Nilai R^2 ambang batas ukuran nilai R^2 yang baik tersebut. Nilai R^2 besarnya berada antara 0 dan 1 yang ditentukan oleh formula sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

dimana : $\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$ = jumlah kuadrat regresi (ESS), dan
 $\sum (Y_i - \bar{Y})^2$ = jumlah kuadrat total (TSS).

d. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut bersifat BLUE (*best linier unbiased estimation*). Sifat BLUE tersebut dapat dipenuhi jika model regresi yang digunakan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Oleh sebab itu, untuk menguji kebaikan model dilakukan uji asumsi klasik, yaitu itu *autokorelasi*, *multikolinearitas*, dan *heteroskedastisitas*.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita*, merupakan produk domestik regional bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun, sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB per kapita (LPDRB) berdasarkan harga konstan 2000. Mengingat data PDRB per kapita yang digunakan berdasarkan dua tahun dasar yaitu tahun dasar 1993 dan 2000, maka dilakukan penyesuaian tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000 dengan rumus sebagai berikut :

$$Data_{1993-1999}(AHK_{2000}) = \frac{Data_{2000}(AHK)}{Data_{2000}(AHK_{1993})} \times Data_{1993-1999}(AHK_{1993})$$

- b. *Bagian distribusi pendapatan penduduk 20% tinggi (incsh) dan bagian distribusi pendapatan penduduk 40% sedang (middle)* adalah kriteria ketimpangan distribusi pendapatan penduduk menurut Bank Dunia.
- c. *Kemiskinan* adalah merupakan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan dalam penelitian ini digunakan dalam bentuk persentase (%).
- d. *Indeks gini*, adalah suatu indeks yang menyatakan ketimpangan relatif distribusi pendapatan penduduk. Nilai indeks gini berada antara 0 dan 1

BAB IV

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

4.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Analisis Bank Dunia yang diterbitkan pada bulan September 1993 yang berjudul *The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy*, mengelompokkan Indonesia sebagai satu dari delapan negara HPAEs (*high performing Asian economies*), yang disebut sebagai kelompok negara dengan keajaiban pertumbuhan ekonomi. Selain Indonesia, tujuh negara lainnya yang masuk kelompok ini adalah Jepang, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada periode 1965 – 1990, ekonomi negara HPAEs ini tumbuh luar biasa, yaitu sekitar dua kali lipat dari negara-negara Asia Timur lainnya, tiga kali lipat dari negara-negara Amerika Latin, dan lima kali lipat dari negara-negara di Sub-Sahara Afrika (Widodo, 2000)

Bagi Indonesia hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Dan tentunya menarik untuk disimak apakah prestasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang dan apakah juga diikuti dengan keadaan yang sama pada tingkat propinsi. Dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kesejahteraan penduduk, maka dalam pembahasan selanjutnya dilihat dari sisi pertumbuhan PDB/PDRB per kapita.

Berdasarkan harga konstan 2000, pertumbuhan PDB per kapita Indonesia rata-rata 6,15 % / tahun pada periode 1994 – 1996. Namun tampaknya apa yang sudah dicapai sebelumnya menjadi tidak berarti lagi sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pertengahan Juli 1997. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia

menyebabkan pertumbuhan PDB per kapita Indonesia menurun drastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negatif 14,3 % pada tahun 1998 dan berangsur pulih pada tahun 1999, akan tetapi masih dalam keadaan pertumbuhan negatif pada angka 0,13 % (Tabel 4.1).

Tabel. 4.1 Perkembangan Pertumbuhan PDB Per Kapita di Indonesia Keadaan Tahun 1993 – 2007

Tahun	PDB Per kapita (Rp.000)		Pertumbuhan PDB Per kapita (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1993	1,757.97	5,586.92	-	-
1994	2,004.55	5,910.90	14.03	5.80
1995	2,345.82	6,295.12	17.02	6.50
1996	2,706.36	6,682.04	15.37	6.15
1997	3,205.65	7,031.73	18.45	5.23
1998	4,814.89	6,025.91	50.20	(14.30)
1999	5,489.68	6,018.17	14.01	(0.13)
2000	6,145.06	6,145.06	11.94	2.11
2001	8,080.53	7,069.85	31.50	15.05
2002	8,645.09	7,142.65	6.99	1.03
2003	9,429.50	7,385.47	9.07	3.40
2004	10,610.08	7,655.53	12.52	3.66
2005	12,675.54	7,999.38	19.47	4.49
2006	15,029.73	8,313.97	18.57	3.93
2007	17,581.38	8,725.26	16.98	4.95
	Rata-rata / tahun		18.29	3.42

Sumber : BPS berbagai terbitan (diolah), penyesuaian tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000

Pasca krisis ekonomi 1997, PDB per kapita Indonesia baru mengalami pertumbuhan yang positif tahun 2000 dan meningkat secara signifikan menjadi 15,05% tahun 2001. Kemudian tahun 2002 melambat menjadi 1,03% dan sampai tahun 2007 rata-rata pertumbuhan PDB per kapita Indonesia sebesar 4,09% / tahun. Secara keseluruhan pada periode 1994 -2007, PDB per kapita Indonesia tumbuh sebesar 3,42% per tahun, bandingkan jika memakai harga berlaku, pada periode yang sama pertumbuhan PDB per kapita Indonesia rata-rata 18,29 % / tahun, jauh lebih besar dari pada memakai harga konstan.. Akan tetapi, hal ini tidak

mencerminkan nilai sesungguhnya dari kesejahteraan masyarakat karena masih terpengaruh oleh inflasi. Oleh sebab itu, menggunakan harga konstan akan lebih baik daripada harga berlaku, karena mencerminkan nilai riil dari pertumbuhan tersebut.

Pada tingkat propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita masing-masing propinsi sangat bervariasi (Tabel 4.2). Untuk lebih memudahkan dalam menganalisisnya, PDRB per kapita dikelompokkan menjadi kategori rendah (<2%), sedang (2-4%), dan tinggi (>4%). Dilihat dari angka rata-rata sejak tahun 1993-07, propinsi Maluku merupakan yang paling rendah pertumbuhan PDRB per kapitanya kemudian diikuti oleh propinsi Riau, berturut-turut negatif 6,45 % / tahun dan negatif 0,30 % / tahun. Lima propinsi lainnya yang masuk kategori rendah yaitu, Sumsel, Kaltim, NAD, Sulut dan Jabar, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita berturut-turut, 0,22%; 0,44 %; 0,47 %, 1,83 per tahun.

Rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata tahunan propinsi Maluku lebih disebabkan karena anjloknya pertumbuhan perekonomian pada tahun 1999 yang mencapai negatif 54,26%, padahal faktanya trend pertumbuhan PDRB per kapita propinsi Maluku menunjukkan peningkatan dari 0,15% tahun 1993 menjadi 3,11 % tahun 2007, sedangkan propinsi Riau lebih banyak mengalami pertumbuhan negatif, tahun 1993 negatif 3,54 % dan tahun 2007 negatif 2,88.

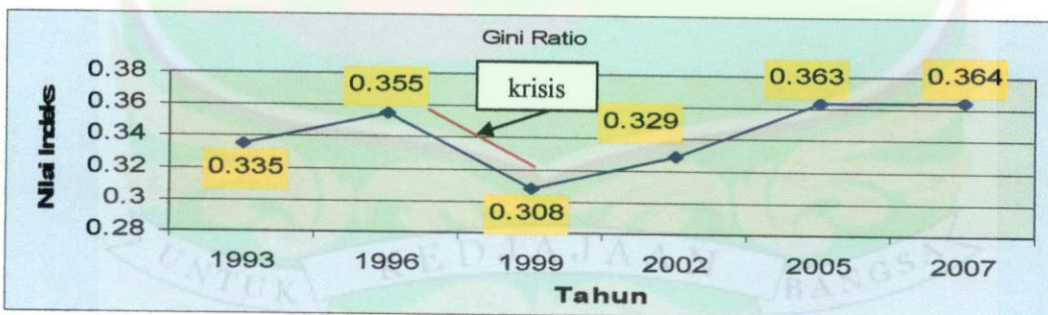
Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Propinsi Papua merupakan yang paling tinggi, yaitu sebesar 10,17 % / tahun diikuti Propinsi Sulawesi Selatan 5,19 % per tahun. Dua belas propinsi lainnya yang dikategorikan tinggi, yaitu Sumut, Sumbar, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kalsel, Sulteng

dikategorikan rata-rata pertumbuhannya tinggi ($> 4\%$ per tahun) hanya provinsi Jambi yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita dari 4,02 % tahun 1993 menjadi 4,53 tahun 2007 atau naik sebesar 0,51%, selebihnya mengalami trend perlambatan. Provinsi yang mengalami trend peningkatan tertinggi yaitu Sulawesi Utara, dari 2,86 % tahun 1993 menjadi 6,39% tahun 2007.

4.2. Perkembangan Distribusi Pendapatan

Disamping mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tujuan lainnya dari pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara lebih merata dan lebih adil kepada segenap lapisan masyarakat. Indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini dan kriteria Bank Dunia.

Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Gini di Indonesia Keadaan Tahun 1993 - 2007.



Sumber : BPS (diolah)

Di Indonesia, menjelang keruntuhan rezim Orde Baru tahun 1998, jika kita menggunakan indeks gini sebagai ukuran ketimpangan relatif distribusi pendapatan, maka distribusi pendapatan masyarakat Indonesia secara nasional relatif lebih merata. Pada tahun 1993, indeks gini 0.335 dan tahun 1996 meningkat menjadi 0,355 seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.1. Meskipun terjadi

dan Gorontalo (propinsi hasil pemekaran tahun 2001). Propinsi yang dikategorikan sedang pertumbuhan PDRB per kapitanya yaitu Bengkulu, Babel, Yogya, Banten, NTB, NTT, Sultra, Maluku dan Kalteng.

Tabel 4.2. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Keadaan Tahun 1993 - 2007

Propinsi	Tahun						Rata-rata (% / tahun)
	1993	1996	1999	2002	2005	2007	
NAD	4.33	0.38	(5.76)	18.40	(8.84)	(5.71)	0.47
Sumut	6.13	7.23	1.40	3.25	2.71	5.31	4.34
Sumbar	5.29	6.21	1.01	4.09	5.02	4.86	4.41
Riau	(3.54)	2.54	(0.39)	(1.59)	4.04	(2.88)	(0.30)
Jambi	4.02	6.01	1.08	4.00	5.15	4.53	4.13
Sumsel	2.30	5.75	(13.95)	0.73	2.46	4.03	0.22
Bengkulu	4.50	2.92	1.03	1.77	3.65	4.98	3.14
Lampung	5.40	6.13	2.46	4.40	3.25	4.81	4.41
Babel	na	na	na	5.88	1.52	1.53	2.98
DKI Jakarta	6.17	7.44	(0.45)	4.76	4.69	5.25	4.64
Jabar	4.71	7.11	(11.11)	1.93	4.64	4.61	1.98
Jateng	5.27	6.33	2.65	2.64	7.21	4.94	4.84
Yogya	5.78	7.20	0.31	3.80	0.97	2.92	3.50
Jatim	5.49	7.36	0.58	3.13	6.39	5.24	4.70
Banten	na	na	na	0.93	7.05	3.79	3.92
Bali	7.95	7.09	(0.55)	1.76	5.98	4.45	4.45
NTB	3.72	6.37	2.90	1.71	(0.73)	4.03	3.00
NTT	7.40	6.70	0.79	3.24	0.93	2.93	3.67
Kalbar	4.75	8.46	1.16	2.27	4.20	4.50	4.22
Kalteng	1.94	9.15	(1.65)	2.30	3.45	1.33	2.75
Kalsel	7.07	7.85	3.09	2.23	3.29	4.42	4.66
Kaltim	(1.59)	4.72	2.10	(1.00)	0.16	(1.73)	0.44
Sulut	8.18	7.74	(18.53)	2.02	6.37	5.19	1.83
Sulteng	5.94	5.79	0.81	3.03	5.59	5.88	4.51
Sulsel	6.00	6.59	1.67	2.62	8.91	5.37	5.19
Sultra	2.86	3.12	(0.31)	3.46	5.10	6.39	3.44
Gorontalo	na	na	na	4.84	4.30	5.39	4.84
Maluku	0.15	5.10	(54.26)	2.78	4.43	3.11	(6.45)
Malut	na	na	na	2.00	3.75	3.19	2.98
Papua	1.94	9.99	(5.92)	16.63	36.28	2.10	10.17

Sumber : BPS berbagai tahun (diolah); *) penyesuaian tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000

Dari sisi perkembangannya, hanya delapan propinsi yang menunjukkan trend peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita sejak 1993 - 2007, sedangkan 22 propinsi lainnya menunjukkan trend perlambatan. Pada propinsi yang

peningkatan, tetapi angka ini masih dalam kategori tingkat ketidakmerataan pendapatan yang *relatif paling merata*. Karena negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal *relatif paling merata*, indeks gininya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Gambar 4.1. memberikan informasi adanya perbaikan distribusi pendapatan selama periode krisis ekonomi 1997-1999. Indeks gini menurun dari 0,355 tahun 1996 menjadi 0,308 tahun 1999, hal yang sama juga terjadi pada ukuran distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia. Pada tahun 1998 terdapat penurunan pada bagian pendapatan yang dinikmati oleh 20% tertinggi dari populasi dan terjadi peningkatan pada 40% bagian terendah dari populasi dibandingkan dengan komposisi pada tahun 1996. Angka ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa krisis ekonomi berdampak baik bagi distribusi pendapatan di Indonesia. Untuk menganalisisnya menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002) perlu kehati-hatian agar tidak keliru menyimpulkannya. Hal ini bisa saja terjadi sebagai akibat persoalan metodologi penghitungan saat menggali pertanyaan tentang pengeluaran rumah tangga atau semata-mata fakta riil lainnya yang hampir tidak diketahui.

Disamping itu, diduga bahwa krisis yang terjadi lebih banyak berpengaruh terhadap tergerusnya kekayaan kaum menengah dan kaya. Dengan terjadi lonjakan harga dollar terhadap rupiah pada saat krisis tersebut, secara relatif kekayaan mereka berkurang. Akibatnya jarak kesenjangan pendapatan antara kaum kaya dan menengah dengan kelompok miskin semakin sempit, sehingga mencerminkan terjadinya perbaikan tingkat distribusi pendapatan selama periode krisis tersebut.

Sejak reformasi, kelihatannya indeks gini nasional cenderung memburuk. Indikatornya dapat terlihat dari meningkatnya indeks gini dari 0,308 tahun 1999

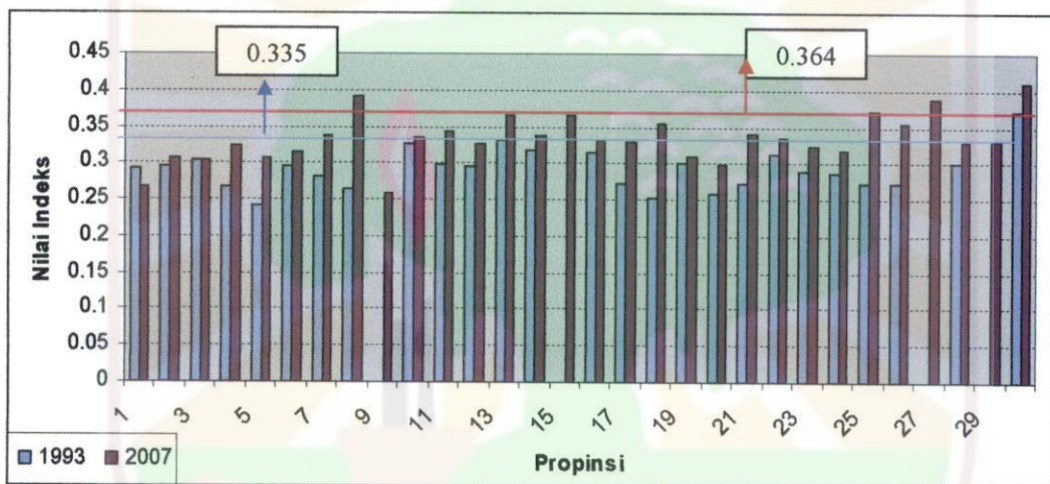
menjadi 0,364 tahun 2007. Indeks gini sebesar 0,364 sudah tergolong tingkat *ketimpangan sedang*, karena distribusi pendapatan yang relatif merata sebagaimana disebutkan sebelumnya hanya berkisar antara 0,20 – 0,35. Artinya angka indeks gini tersebut memberikan indikasi bahwa reformasi yang diharapkan membawa perubahan disegala bidang kehidupan termasuk itu perubahan yang lebih adil dalam pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan tersebut.

Pada tingkat propinsi, selain propinsi NAD, seluruh propinsi lainnya mengalami peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan (Gambar 4.2). Indikatornya dapat terlihat dari semakin meningkatnya indeks gini dalam 15 tahun terakhir. Dari semua propinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, tampaknya propinsi Lampung mengalami perubahan relatif besar daripada propinsi lainnya. Sedangkan propinsi NAD mengalami perbaikan distribusi pendapatan pada periode yang sama, yaitu dari indeks gini 0.293 tahun 1993 menurun menjadi 0,268 pada tahun 2007. Sedangkan propinsi Sumbar tidak mengalami perubahan distribusi pendapatan dengan angka indeks gini yang persis sama antara tahun 1993 dan 2007.

Indeks gini yang paling rendah (0,242) tahun 1993 ditempati oleh propinsi Jambi dan paling tinggi serta satu-satunya propinsi yang indeks gininya diatas nasional terjadi di Propinsi Papua (0,370). Sedangkan pada tahun 2007, yang paling rendah indeks gininya adalah propinsi Bangka Belitung (Babel) dan yang paling tinggi masih tetap propinsi Papua. Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di propinsi papua mungkin disebabkan karena hanya sebagian kecil saja penduduk yang dapat menikmati kekayaan alam papua yang melimpah seperti

pertambangan (misalnya tembaga PT Freport McMoran). Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga sulit untuk memasuki lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Indikator rendahnya SDM tersebut adalah rendahnya IPM (terendah dari seluruh propinsi sejak tahun 1999-2006) dan persentase melek huruf penduduk usia 15 ke atas (terendah dari seluruh propinsi pada tahun 2005 dan 2006) di Papua.

Gambar 4.2. Perkembangan Indeks Gini Propinsi-Propinsi di Indonesia keadaan Tahun 1993 dan 2007



Sumber : BPS berbagai tahun (diolah)

Ket : 1. NAD, 2. Sumut, 3. Sumbar, 4. Riau, 5. Jambi, 6. Sumsel, 7. Bengkulu, 8. Lampung, 9. Babel, 10. DKI, 11. Jabar, 12. Jateng, 13. Yogya, 14. Jatim, 15. Banten, 16. Bali, 17. NTB, 18. NTT, 19. Kalbar, 20. Kalteng, 21. Kalsel, 22. Kaltim, 23. Sulut, 24. Sulteng, 25. Sulsel, 26. Sultra, 27. Gorontalo, 28. Maluku, 29. Maluku, 30. Papua.

Secara umum ketimpangan distribusi pendapatan propinsi-propinsi di Indonesia relatif lebih merata, akan tetapi kecenderungannya malah makin meningkat pada periode 1993 – 2007. Jika tahun 1993 hanya propinsi Papua yang indeks gинinya berada diatas 0,35 (kategori sedang), pada tahun 2007 sebanyak 7 propinsi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya berada diatas 0,35, yaitu berturut-turut Propinsi Papua, Lampung, Gorontalo, Sulsel, Yogya, Banten dan

NTT. Propinsi lainnya (kecuali Aceh) meskipun mengalami memburuknya distribusi pendapatan, tetapi angka indeks ginya masih berada dibawah 0,35.

Tabel 4.3. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Menurut Kriteria Bank Dunia Keadaan Tahun 1993 dan 2007.

Tahun	% Pembagian Distribusi Pendapatan		
	40% rendah	40% sedang	20% tinggi
1993	20,34	36,90	42,76
2007	19,10	36,11	44,79

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk berada pada proporsi 40% penduduk yang berpendapatan rendah. Sejak tahun 1993-2007, secara nasional, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia relatif lebih rendah (*low inequality*). Karena bagian 40% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan besar dari 17% dari total pendapatan nasional, yaitu sebesar 20,34%. Namun, sama halnya dengan ukuran indeks gini, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat pada tahun 2007, artinya terjadi penurunan proporsi pada bagian 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menerima bagian 19,10% dari total pendapatan nasional (Tabel 4.3.)

Pada Tabel 4.4, sama halnya dengan indeks gini, kecendrungan memburuknya distribusi pendapatan juga terjadi di hampir semua propinsi, kecuali Propinsi Aceh. Memburuknya distribusi pendapatan ditandai dengan semakin mengecilnya angka proporsi bagian 40% penduduk berpendapatan rendah. Yang paling besar memburuknya ketimpangan distribusi pendapatan adalah propinsi Lampung, yaitu dari 24.73% tahun 1993 menjadi 17.94% tahun 2007. Kemudian diikuti oleh propinsi NTT, dan Sultra.

Baik ukuran indeks gini maupun berdasarkan kriteria bank dunia menunjukkan trend yang sama, yaitu tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Indonesia cenderung memburuk dari tahun 1993 hingga tahun 2007.

Tabel 4.4. Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Propinsi-Propinsi di Indonesia Menurut Kriteria Bank Dunia Keadaan Tahun 1993 dan 2007

Propinsi	Pembagian Distribusi Pendapatan					
	40% rendah		40% sedang		20% tinggi	
	1993	2007	1993	2007	1993	2007
NAD	22.85	23.80	37.52	39.60	39.63	36.60
Sumut	22.36	22.34	38.33	37.33	39.31	40.33
Sumbar	21.78	21.62	37.74	37.65	40.49	40.73
Riau	23.50	21.19	39.24	37.79	37.26	41.03
Jambi	25.18	21.95	40.28	37.5	34.55	40.55
Sumsel	22.46	21.70	38.42	37.74	39.12	40.57
Bengkulu	24.03	20.33	37.21	37.01	38.76	42.66
Lampung	24.73	17.94	37.75	34.66	37.52	47.40
Babel	na	25.03	na	38.88	na	36.09
DKI Jakarta	21.13	19.51	36.53	35.34	42.34	45.15
Jabar	22.30	20.08	37.59	36.26	40.11	43.66
Jateng	23.34	20.97	37.10	37.48	39.57	41.55
Yogya	21.02	18.98	36.09	35.73	42.89	45.28
Jatim	22.39	19.84	35.99	38.34	41.62	41.82
Banten	na	18.66	na	36.44	na	44.91
Bali	21.38	19.58	37.79	38.28	40.83	42.14
NTB	24.53	21.13	36.84	36.66	38.62	42.21
NTT	25.66	20.40	37.58	34.70	36.76	44.90
Kalbar	22.06	21.36	38.40	38.99	39.54	39.66
Kalteng	24.44	22.32	38.64	38.17	36.91	39.51
Kalsel	23.51	19.99	38.53	36.70	37.95	43.31
Kaltim	21.71	21.13	37.98	36.19	40.30	42.68
Sulut	22.02	21.19	40.17	37.57	37.81	41.24
Sulteng	23.03	20.88	38.91	39.09	38.05	40.04
Sulsel	24.10	18.57	38.42	36.91	37.47	44.52
Sultra	24.45	19.38	37.70	37.45	37.84	43.18
Gorontalo	na	18.64	na	33.69	na	47.67
Maluku	21.18	20.87	39.94	37.43	38.88	41.70
Malut	na	20.39	na	36.81	na	42.80
Papua	17.37	16.07	38.93	34.34	43.70	49.58

Sumber : BPS (diolah)

Akan tetapi, terdapat perbedaan antara ukuran indeks gini dan kriteria bank dunia dalam hal derajat keparahannya. Jika berdasarkan indeks gini, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional sudah dikategorikan *sedang*, sedangkan berdasarkan kriteria bank dunia masih berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang masih *rendah (low inequality)*.

4.3. Perkembangan Kemiskinan

Perhitungan angka kemiskinan, dimulai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 – 1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Setelah itu, setiap tiga tahun sekali, sejak tahun 1984, BPS secara rutin mempublikasikan data kemiskinan. Sampai dengan tahun 1987, informasi kemiskinan hanya disajikan untuk tingkat nasional. Pada tahun 1990, informasi kemiskinan sudah tersedia pada tingkat provinsi, meskipun untuk beberapa provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi data kemiskinan sudah mencakup seluruh Propinsi dan tahun 2002 sudah tersedia sampai tingkat Kabupaten/Kota (BPS, 2006). Oleh sebab itu, penggunaan data kemiskinan dalam penelitian ini juga mempertimbangkan ketersediaan data untuk seluruh provinsi tersebut.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia telah menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang luar biasa. Selama 20 tahun, Indonesia telah mampu mengurangi penduduk miskin dari 40,08% (54,20 juta orang) tahun 1976 menjadi 11,34% (22,50 juta orang) tahun 1996. Artinya selama periode tersebut

pemerintah Orde baru telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebesar 31,7 juta orang. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 seakan-akan kondisinya berbalik arah jauh ke prakondisi krisis. Penduduk miskin bertambah secara signifikan (lihat Tabel 4.5). Selain itu, pada saat krisis juga munculnya fenomena kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis tersebut atau sebab lain (misalnya bencana alam), yang jumlahnya pada saat krisis tahun 1997 diperkirakan cukup banyak (Dhanani dan Islam, 2002).

Fenomena *transient poverty*, yang menurut BPS (2006) dicirikan sebagai orang yang penghasilannya dekat dengan garis kemiskinan, diperkirakan merupakan penyebab meningkatnya angka kemiskinan di tahun 1998, sehingga jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 24,20% (sekitar 49,50 juta jiwa). Jadi angka kemiskinan yang sudah dapat diturunkan sebesar 31,7 juta orang sampai tahun 1996, meningkat lagi sebesar 27 juta orang (kembali menjadi miskin) sebagai akibat dampak krisis. Selain itu, dampak krisis tahun 1997-1999 menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan paket pangan dan non pangan yang selama ini digunakan dalam menghitung garis kemiskinan sampai tahun 1996. Penyesuaian yang dilakukan mulai tahun 1998 menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002) agar paket pangan dan non pangan yang digunakan benar-benar merefleksikan kebutuhan dasar kontemporer dari kaum miskin, sebagai akibat perubahan kondisi krisis.

Tabel 4.5. Perkembangan Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Keadaan Tahun 1976- 2007.

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		% Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1976 ¹⁾	4,522	2,849	38.79	40.37	40.08	10.00	44.20	54.20
1978 ¹⁾	4,969	2,981	30.84	33.38	33.31	8.30	38.90	47.20
1980 ¹⁾	6,831	4,449	29.04	28.42	28.56	9.50	32.80	42.30
1981 ¹⁾	9,777	5,877	28.06	26.49	26.85	9.30	31.30	40.60
1984 ¹⁾	13,731	7,746	23.14	21.18	21.64	9.30	25.70	35.00
1987 ¹⁾	17,381	10,294	20.14	16.14	17.42	9.70	20.30	30.00
1990 ²⁾	20,614	13,295	16.75	14.33	15.08	9.40	17.80	27.20
1993 ¹⁾	27,905	18,244	13.45	13.79	13.67	8.70	17.20	25.90
1996 ¹⁾	38,246	27,413	9.71	12.30	11.34	7.20	15.30	22.50
1996 ³⁾	42,032	31,366	13.6	19.90	17.70	9.60	24.90	34.50
1998 ²⁾	96,959	72,780	21.9	25.70	24.20	17.60	31.90	49.50
1999 ³⁾	92,409	74,272	19.4	26.00	23.40	15.60	32.30	47.90
1999 ⁴⁾	89,845	69,420	15,00	20,00	18,00	12,30	24,80	37,10
2000 ⁵⁾	91,632	73,648	14.6	22.38	19.14	12.30	26.40	38.70
2001 ⁶⁾	100,011	80,382	9.79	24.84	18.41	8.60	29.30	37.90
2002 ⁷⁾	130,499	96,512	14.46	21.10	18.20	13.30	25.10	38.40
2003 ⁸⁾	138,803	105,888	13.57	20.23	17.42	12.20	25.10	37.30
2004 ⁸⁾	143,455	108,725	12.13	20.11	16.66	11.30	24.80	36.10
2005 ⁸⁾	150,799	117,259	11.37	19.51	15.97	12.40	22.70	35.10
2006 ⁸⁾	174,290	130,584	na	na	17.75	14.50	24.80	39.30
2007 ⁸⁾	187,942	146,837	na	na	16.58	13.60	23.60	37.20

Sumber : Statistik Indonesia, 2008 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, 2008 (diolah)

Catatan :

- 1) Menggunakan Standar Lama sebelum tahun 1998 (1976-1996)
- 2) Hasil Susenas Desember 1998
- 3) Hasil Susenas Februari (reguler), Angka tanpa Timor Timur
- 4) Hasil Susenas Agustus 1999, Angka tanpa Timor Timur
- 5) Hasil estimasi termasuk NAD dan Maluku
- 6) Hasil estimasi termasuk NAD
- 7) Termasuk estimasi 4 provinsi (NAD, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) yang tidak terkena sampel Susenas Modul Konsumsi 2002
- 8) Hasil Susenas Panel

Pada akhir periode krisis, mulai tahun 1999, informasi kemiskinan sudah disajikan setiap tahun. Dalam Tabel 4.5 terlihat bahwa rata-rata penduduk miskin Indonesia sejak tahun 1999 – 2007 sekitar 17,57 % atau 35,46 juta orang. Trend angka kemiskinan cenderung menurun sampai tahun 2005, akan tetapi tahun 2006 meningkat sekitar 1,78% atau sekitar 4,2 juta orang. Peningkatan ini diperkirakan dipicu oleh naiknya harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Oktober 2005 sehingga

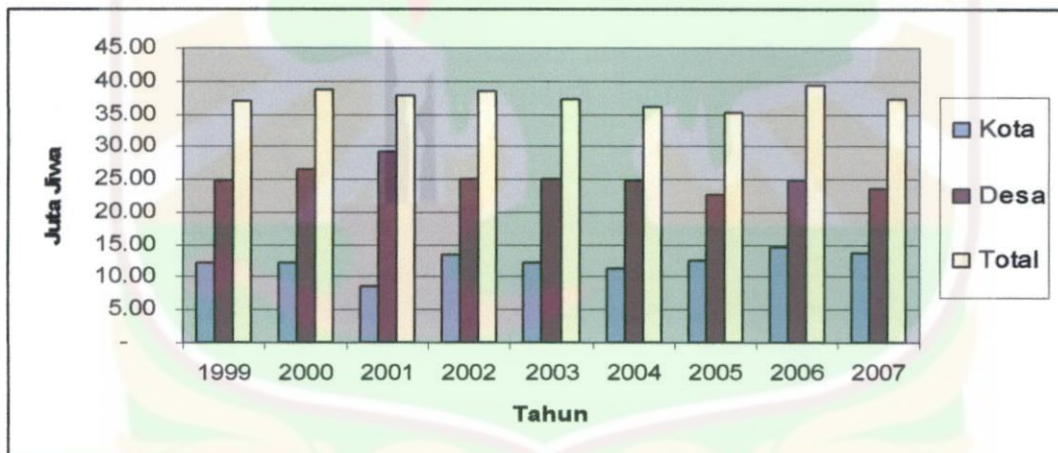
menimbulkan multiplier efek terhadap ongkos produksi barang dan jasa. Sebagai akibatnya daya beli masyarakat menurun karena pada saat yang sama pendapatan mereka tidak meningkat.

Tampaknya peningkatan angka kemiskinan lebih cepat dari laju berkurangnya angka kemiskinan. Indikatornya dapat kita lihat dari analisis sebelumnya yaitu saat krisis ekonomi tahun 1997-1999 dan naiknya harga BBM bulan Oktober 2005. Meskipun dalam beberapa tahun telah terjadi pengurangan angka kemiskinan, namun jika pemerintah tidak dapat menjaga kondisi makro perekonomian nasional, maka usaha tersebut tidak ada artinya lagi karena dalam beberapa saat angka kemiskinan akan meningkat secara drastis. Agaknya jika pemerintah dapat menjaga kondisi makro perekonomian tetap stabil merupakan salah satu cara yang sangat ampuh mencegah timbulnya kemiskinan baru dan sekaligus mengendalikan angka kemiskinan. Karena masyarakat yang dekat dengan garis kemiskinan (*transient poverty*), menurut BPS (2006) jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara tersebut bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin, dan sebaliknya.

Sebagai perbandingan pada Gambar 4.3. terlihat bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di daerah perdesaan ketimbang di wilayah perkotaan. Jika tahun 1999 penduduk miskin di wilayah perdesaan sekitar 66,85%, menurun menjadi 63,44% tahun 2007, tetapi secara keseluruhan rata-rata penduduk miskin sejak tahun 1999 -2007 hampir 67,22% berada di wilayah perdesaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah perdesaan tersebut identik dengan sektor pertanian. Oleh sebab itu, kemiskinan di perdesaan lebih banyak berada disektor pertanian.

Ada faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab banyaknya kemiskinan disektor pertanian, antara lain : (1) tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah, (2) daya saing petani atau dasar tukar domestik (*term of trade*) komoditi pertanian terhadap output industri semakin lemah, dan (3) tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

Gambar 4.3. Perbandingan Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Keadaan Tahun 1999 - 2007



Sumber : BPS (diolah)

Bila di *break down* pada tingkat propinsi, jumlah orang miskin di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di 3 propinsi, yaitu Jabar, Jateng dan Jatim (Tabel 4.6). Baik secara jumlah maupun secara persentase, terjadi peningkatan angka kemiskinan di ketiga propinsi tersebut. Berturut-turut peningkatan angka kemiskinan dimulai dari propinsi Jatim meningkat sebesar 6,73% (2.731,6 Juta orang) pada tahun 2007, diikuti oleh propinsi Jateng 4,65% (1.938,5 juta orang), dan Jabar 1,45% (845,5 juta orang) dari keadaan tahun 1993.

Tabel 4.6. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi-Propinsi di Indonesia Keadaan Tahun 1993 dan 2007

Propinsi	1993		2007	
	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
NAD	496.7	13.46	1,083.7	26.65
Sumut	1,331.6	12.31	1,768.5	13.9
Sumbar	566.1	13.47	529.2	11.9
Riau	410.9	11.2	574.5	11.2
Jambi	299.4	13.38	281.9	10.27
Sumsel	1,023.9	14.89	1,331.8	19.15
Bengkulu	173.1	13.11	370.6	22.13
Lampung	751.8	11.7	1,661.7	22.19
Babel	na	na	95.1	9.54
DKI Jakarta	497.1	5.65	405.7	4.61
Jabar	4,612.4	12.2	5,457.9	13.65
Jateng	4,618.7	15.78	6,557.2	20.43
DIY	343.5	11.77	633.5	18.99
Jatim	4,423.7	13.25	7,155.3	19.98
Banten	na	na	886.2	9.07
Bali	270.2	9.46	229.1	6.63
NTB	692.4	19.52	1,118.6	24.99
NTT	756.4	21.84	1,163.6	27.51
Kalbar	874.5	25.05	584.3	12.91
Kalteng	321.6	20.85	210.3	9.38
Kalsel	517.8	18.61	233.5	7.01
Kaltim	294.9	13.75	324.8	11.04
Sultra	304.7	11.79	250.1	11.42
Sulteng	193.9	10.48	557.4	22.42
Sulse	659.2	8.97	1,083.4	14.11
Sultra	162.3	10.84	465.4	21.33
Gorontalo	na	na	241.9	27.35
Maluku	478.9	23.93	404.7	31.14
Malut	na	na	109.9	11.97
Papua	441.9	24.16	793.4	40.78

Sumber : BPS (diolah)

Secara umum, penurunan dan kenaikan angka kemiskinan di semua propinsi hampir berimbang dari keadaan tahun 1993 dan 2007 jika dilihat dari sisi presentase terhadap jumlah penduduk. Sebanyak 15 propinsi mengalami peningkatan angka kemiskinan, 14 propinsi lainnya mengalami penurunan angka kemiskinan dan 1 propinsi tidak mengalami perubahan atau tetap persentasenya, yaitu propinsi Riau (tetapi secara jumlah mengalami peningkatan). Propinsi

Maluku yang termasuk 15 Propinsi yang mengalami peningkatan secara persentase, tetapi secara jumlah mengalami penurunan orang miskin sebanyak 74,16 ribu orang. Begitu juga dengan propinsi Kaltim yang mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara jumlah mengalami peningkatan

Pada tahun 1993, propinsi yang paling tinggi angka kemiskinan secara persentase adalah propinsi Papua (24,16%), diikuti Kalbar (25,5%) dan Maluku (23,93%). Pada tahun 2007, propinsi Papua masih tetap yang tertinggi dengan 40,78%, diikuti oleh Maluku (31,14%) dan Aceh (26,65%). Sedangkan propinsi Kalbar mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 12,14% sehingga pada tahun 2007 hanya tinggal 12,91% dan ini merupakan propinsi yang paling tinggi penurunan angka kemiskinan dalam 15 tahun terakhir. Tingginya angka kemiskinan di Papua sejalan dengan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi ini (Gambar 4.2).

Garis Kemiskinan

Peningkatan yang substansial pada kemiskinan absolut, kenyataannya diakibatkan oleh perubahan drastis pada garis kemiskinan yang ditentukan, baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Secara umum, baik menggunakan penghitungan garis kemiskinan dengan standar lama, maupun standar yang disesuaikan tahun 1998, garis kemiskinan perkotaan jauh lebih tinggi dengan garis kemiskinan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan hidup di perkotaan jauh lebih tinggi dari perdesaan dan biasanya kemiskinan di perkotaan jauh lebih dalam derajat keparahan kemiskinannya.

Sebenarnya metode penghitungan menggunakan garis kemiskinan yang sudah sejak lama digunakan oleh pemerintah sampai saat ini masih menjadi

perdebatan. Namun pemerintah masih tetap menggunakan garis kemiskinan makanan tersebut, yang didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk memperoleh makanan setara 2100 kalori dan 45 gram protein per hari. Jika menggunakan standar bank dunia yang mengacu kepada pendapatan US \$ 1 atau US \$ 2 per orang per hari atau menggunakan standar MDGs US \$ 1,5 per orang per hari, tentu secara logika angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Jadi pilihan untuk menetapkan garis kemiskinan makanan, disamping sebagai salah cara untuk menentukan siapa yang dikategorikan miskin, secara tidak langsung dapat menekan angka kemiskinan tersebut (bukannya orang miskin tidak ada)

Sebagai ilustrasi, garis kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang dirata-ratakan menjadi Rp. 167.390 per orang per bulan menghasilkan angka kemiskinan 37,2 juta orang pada tahun 2007. Jika kita menggunakan standar yang dipakai oleh MDGs, karena Indonesia juga ikut dalam komitmen global tersebut, maka garis kemiskinan menjadi Rp. 450.000 per orang per bulan (asumsi nilai tukar Rp. 10.000,-/ US\$), maka angka kemiskinan tentu akan meningkat secara drastis.

Agaknya perlu juga dipikirkan, dipertimbangkan dan ditinjau kembali oleh pemerintah, apakah standar garis kemiskinan yang dipakai sekarang sudah benar-benar merefleksikan kebutuhan dasar masyarakat (pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan)?, apakah tidak terlalu rendah (*underestimate*) garis kemiskinan tersebut, karena kalau mengacu kepada standar kebutuhan hidup minimum yang dikeluarkan BPS (2008) sekitar Rp. 719.834 pada tahun 2006. Mengapa pemerintah tidak mencoba mengadopsi standar pengukuran garis kemiskinan bank

dunia dan atau MDGs?, karena kalau diadopsi akan dapat lebih mendekati standar kebutuhan hidup minimum tersebut. Namun, penelitian ini bukan ditujukan untuk menganalisis lebih jauh mengenai garis kemiskinan tersebut.

Sebagai kesimpulan, secara nasional penduduk miskin cenderung menurun pada periode sebelum krisis ekonomi hingga tahun 1996. Pada saat krisis ekonomi 1997 - 1999 terjadi peningkatan angka kemiskinan secara signifikan, terutama karena munculnya fenomena kemiskinan sementara. Setelah ada perbaikan kondisi perekonomian pasca krisis, penduduk miskin cenderung kembali menurun sampai tahun 2005. Namun karena terjadinya kenaikan harga BBM Oktober 2005 penduduk miskin naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,30 Juta orang dan tahun 2007 kembali turun ke 37,20 Juta orang. Penurunan ini diperkirakan karena pemerintah sudah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kelihatannya dampak BLT tidak serta merta dapat memperbaiki daya beli masyarakat karena tahun 2006 penduduk miskin meningkat padahal BLT sudah dikururkan

Pada sisi lain, garis kemiskinan (masih jadi perdebatan) yang digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk menetapkan siapa si "miskin" perlu kiranya dipertimbangkan untuk ditinjau apakah sudah mencerminkan atau mereflesikan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan untuk mengadopsi kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dan atau MDGs, bukankah penanggulangan kemiskinan sudah menjadi komitmen global? Dan Indonesia ikut termasuk dalam komitmen tersebut, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengadopsinya.

BAB V

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pada bab ini akan digambarkan secara umum bagaimana perjalanan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk program-program nyata yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini menjadi penting untuk dibahas mengingat kemiskinan absolut berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai. Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari pembahasan ini akan terlihat sejauhmana komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

5.1. Kebijakan Langsung dan Tidak Langsung

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung sarasannya ditujukan untuk mengurangi penduduk miskin. Namun, harus diakui banyak kebijakan pemerintah yang bersifat tidak langsung (berada di luar kebijakan penanggulangan kemiskinan), akan tetapi membawa dampak terhadap berkurangnya angka kemiskinan. Kebijakan yang disebut terakhir umumnya berkaitan dengan pengendalian ekonomi makro, seperti kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan tingkat bunga, dan kebijakan fiskal dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah upaya pemerintah secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan. Dokumen rencana pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) I – VI (1969-1999) di zaman Orde Baru, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004 - 2009. Dua dokumen perencanaan terakhir merupakan produk zaman Orde Reformasi. Oleh sebab itu, perodesasi pembahasan kebijakan penanggulangan kemiskinan akan dibagi menjadi periode Orde baru dan periode Orde Reformasi.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Periode Orde Baru

Pada Repelita I (1969-1974), kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam dokumen Repelita tersebut. Tujuan Repelita I secara umum adalah untuk meningkat taraf hidup rakyat banyak. Hal ini mengandung pengertian bahwa ada keinginan dari pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, tentunya termasuk mereka yang miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan yaitu : mencukupi kebutuhan masyarakat dibidang pangan, sandang, perumahan rakyat, perluasan kesempatan kerja dan perbaikan prasarana, dengan titik berat pembangunan berada disektor pertanian.

Pada Repelita II (1974-1979), tujuan pembangunan masih hampir sama dengan Repelita I yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai urutan pertama dari seluruh usaha pembangunan dan titik berat tetap berada disektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Tujuan ini dicapai dengan sasaran yaitu, (1) tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup, dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umumnya, (2) tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak, (3) keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna, (4) keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata, (5) meluasnya kesempatan kerja.

Fokus perhatian masalah dalam Repelita II yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian sasaran tersebut, yaitu : perluasan kesempatan kerja, pembagian kembali hasil pembangunan secara merata, perhatian yang lebih besar pada masalah-masalah pendidikan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sekaitan dengan permasalahan sosial, sudah mulai disampaikan keinginan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam bab I Repelita II, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“.....secara bertahap diusahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan, dan mempersempit jurang antara yang kaya dan yang miskin.....”

Akan tetapi, keinginan ini belum dibarengi dengan rencana kebijakan yang secara langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut.

Pada Repelita III (1979 – 1984), tujuan pembangunan masih hampir sama dengan 2 (dua) Repelita sebelumnya, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Untuk mencapai tujuan ini titik berat pembangunan di sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pada Repelita III mulai diperkenalkan konsep trilogi pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Trilogi pertama, dijabarkan ke dalam 8 jalur pemerataan,

diantaranya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyak, yaitu :

- a. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
- b. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- c. pemerataan pembagian pendapatan;
- d. pemerataan kesempatan kerja;

Sama halnya dengan Repelita II, pada Repelita III harapan pemerintah dengan adanya beberapa jalur pemerataan tersebut tercantum dalam bab I Repelita III, sebagaimana dikutip berikut ini :

“.....semakin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan menjadi semakin kecil.....”

Akan tetapi rencana yang konkrit dalam bentuk kebijakan yang secara langsung juga belum dimunculkan dalam dokumen Repelita III.

Perhatian terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Repelita IV (1985 – 1989), tidak jauh berbeda dari 3 (tiga) Repelita sebelumnya. penanggulangan kemiskinan belum diprioritaskan secara langsung. Kondisi yang sama juga terjadi sampai akhir Repelita V (1989-1994) atau berakhirnya PJP I. Baru pada Repelita VI (1994 -1999), kebijakan penanggulangan kemiskinan secara langsung menjadi pokok perhatian pemerintah Orde Baru dengan menempatkan secara tersendiri rencana penanggulangan permasalahan kemiskinan dalam Bab 9, yaitu Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan. Selain melanjutkan program-program tidak langsung seperti Repelita sebelumnya, pada

Repelita VI ditetapkan program khusus untuk penanggulangan kemiskinan yaitu Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Periode Reformasi

Tuntutan reformasi yang bergulir telah merubah peta politik dan arah pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia pada awal reformasi diarahkan terutama untuk pemulihan ekonomi akibat krisis 1997-1999. Sejalan dengan hal ini dalam Proopenas (2000-2004), untuk membantu masyarakat miskin yang terpuruk akibat krisis, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah secara tegas menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui dua strategi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin dan memberdayakan masyarakat agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dalam RPJM (2004-2009), sasaran pokok dari strategi pembangunan adalah pemenuhan hak dasar rakyat sesuai amanat konstitusi. Dari 10 hak-hak dasar tersebut yang berkaitan langsung dengan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu (1) hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, (2) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (3) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan. Atas dasar pemenuhan hak-hak dasar rakyat ini, maka pengurangan kemiskinan menjadi *sasaran pertama* yang mendapatkan perhatian dari lima sasaran dalam agenda peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan

menempatkannya secara khusus dalam bab 16 tentang penanggulangan kemiskinan dalam RPJM (2004-2009).

Sebagai kesimpulan, pemerintah sejak awal dimulainya Repelita I telah berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kebijakan-kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dibidang pangan, pendidikan kesehatan dan perumahan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut masih bersifat tidak langsung bagi mereka yang miskin. Dengan prioritas mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa orde baru, fokus kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan hanya menjadi tujuan sampingan dari tujuan pembangunan. Akan tetapi dampak dari kebijakan tidak langsung tersebut harus diakui cukup berhasil dalam mengurangi penduduk miskin seperti dibahas pada Bab IV sebelumnya. Fokus kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan pada awal Repelita VI mulai mengalami perubahan mendasar. Selain melanjutkan kebijakan-kebijakan tidak langsung sektoral dan regional, pemerintah dalam Repelita VI telah menetapkan kebijakan IDT untuk menanggulangi kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan di seluruh Indonesia.

5.2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Rencana penanggulangan kemiskinan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan tersebut hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang miskin, jika rencana tersebut diimplementasikan melalui serangkaian program-program yang nyata bagi masyarakat miskin. Setiap kebijakan yang dilaksanakan memerlukan situasi yang mendukung agar kebijakan tersebut dapat mencapai

sasarannya. Menurut Kartasmita (1996) agar kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dapat berjalan baik dan efektif diperlukan adanya stabilitas, baik stabilitas sosial, politik maupun ekonomi. Kerusuhan sosial dan politik yang tidak menentu, serta inflasi yang tinggi, merupakan kondisi yang berlawanan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pengendalian ekonomi makro oleh pemerintah.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan pemerintah sejak awal Repelita VI sampai RPJM (2004-2009) yang sarannya untuk masyarakat miskin, antara lain yaitu : program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKS), program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan selama krisis ekonomi, program bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) (dulunya disebut program Operasi Pasar Khusus Beras), program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan program *ad hoc* sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang dimulai bulan Oktober 2005, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terakhir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) -Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada dan dijalankan oleh kementerian / lembaga yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program IDT resmi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya Repelita VI (1 April 1994). Program IDT dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 1993 mengenai pengentasan

kemiskinan. Program IDT diharapkan tidak hanya dapat mempercepat upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga bagaimana menjadikan masyarakat miskin tersebut mandiri. Komponen program IDT terdiri dari, yaitu; (1) dana bergulir untuk usaha kecil; (2) provisi penasihat kegiatan/usaha; (3) pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal (P3DT).

Program IDT mengandung tiga tujuan dasar, yaitu (1) sebagai pendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan atau mengurangi disparitas sosial dalam masyarakat dan (3) sebagai upaya pengembangan dan mengaktifkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan dana bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin.

Sasaran program IDT adalah masyarakat yang paling lemah dan paling tertinggal ekonominya (penduduk miskin) yang berada di desa-desa yang dikategorikan sebagai *desa tertinggal* (kantong-kantong kemiskinan) di seluruh Indonesia. Dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program IDT adalah dana hibah bergulir (*revolving grant*) dari pemerintah sebesar Rp. 20 Juta perdesa per tahun selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 1994, 1995, dan 1996.

Program IDT dimulai dengan pembentukan *kelompok masyarakat* yang akan memperoleh bantuan, baru kemudian dana IDT dicairkan dan diserahkan kepada kelompok masyarakat dan menjadi dana milik kelompok yang digulirkan dan tidak dikembalikan kepada pemerintah. Dana ini menjadi dana abadi yang tetap digulirkan di daerah perdesaan dan tidak boleh dialihkan di luar wilayah perdesaan dan di luar kepentingan masyarakat perdesaan (Kartasasmita, 1996)

Persyaratan pencairan dana program IDT dari bank penyalur kepada kelompok masyarakat setelah mereka menyiapkan daftar isian kegiatan kelompok (DIKK). Dengan demikian, tanpa DIKK dana IDT tidak bisa dicairkan. Dana yang disalurkan oleh bank penyalur sebesar yang tertuang dalam DIKK tersebut, serta tidak ada dan tidak boleh ada pemotongan untuk tujuan apapun. Sekali dana IDT dicairkan selanjutnya menjadi tanggungjawab kelompok untuk mengatur penggunaannya (Kartasasmita, 1996).

Setiap kelompok masyarakat terdiri dari sekitar 30 keluarga miskin, dan dapat saja terdapat beberapa kelompok dalam sebuah desa tergantung keadaan setempat. Dana yang telah diterima kelompok dipinjamkan kepada masing-masing anggota kelompok dan harus dikembalikan lagi kepada kelompok. Prosedur pengembaliannya diatur sesuai kesepakatan anggota dalam kelompok. Pada akhirnya akan tercipta akumulasi modal dalam kelompok yang dapat digunakan terus menerus untuk pengembangan usaha anggota kelompok (Mubyarto dalam Remi dan Tjipterijanto, 2002).

Sejak digulirkannya program IDT, setelah tiga tahun berjalan (1994/95 - 1996/97) program IDT telah mencakup 28.223 desa tertinggal atau sekitar 34% dari seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Jumlah kelompok masyarakat penerima program mencapai 136.000 kelompok yang merupakan 3,4 juta rumah tangga miskin (Mubyarto dalam Remi dan Tjipterijanto, 2002). Menurut Remi dan Tjipterijanto (2002) pada tahun 1996 rata-rata jumlah anggota rumah (ART) tangga miskin sebanyak 5,3 orang/rumah tangga. Artinya jika kita konversikan jumlah rata-rata ART tersebut dengan cakupan program IDT, maka program IDT sampai tahun ketiga telah menjangkau 18.020.000 jiwa orang miskin (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Cakupan Program IDT Selama 3 Tahun (1994/95 – 1996/97)

Tahun	Desa Tertinggal	Pokmas	KK Miskin (Juta)	Jumlah Org Miskin (Juta)
1994/95	18.178	98.027	2,76	14 ,00
1995/96	22.094	122.946	2,9	-
1996/97	28.223	136.000	3,4	18,02

Sumber : Remi dan Tjipterijanto, 2002 (diolah)

Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKS)

Selain program IDT, dalam Repelita VI secara paralel juga dilaksanakan program PKS. PKS merupakan program yang ditujukan kepada keluarga miskin yang berada di *desa tidak tertinggal*. Program PKS ini atas usulan Prof Haryono Suyono kepada Presiden Soeharto sebelum digulirkannya program IDT, bahwa jumlah keluarga miskin di desa tidak tertinggal jauh lebih besar dari keluarga miskin yang berada di desa tertinggal, sehingga Presiden Soeharto menyetujui program PKS dan dikembangkan di 43.000 desa tidak tertinggal seluruh Indonesia (Suyono, 2009).

Tujuan program PKS adalah untuk melatih dan membantu keluarga miskin mengembangkan usaha produktifnya, dengan sasaran akhir meningkatkan status mereka menjadi keluarga sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, program PKS memiliki dua sub Program, yaitu Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Program Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra).

Jadi selama Repelita VI telah dikembangkan dua program utama yang berbasis wilayah untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu program IDT untuk desa tertinggal dan program PKS untuk desa tidak tertinggal. Namun terlepas dari berbagai kemajuan dalam pelaksanaannya dilapangan, program ini banyak juga menuai kritikan dari masyarakat.

Program Penanggulangan Kemiskinan selama krisis ekonomi

Sejak pertengahan 1998 telah diluncurkan program Jaring Pengaman Sosial yang merupakan program penyelamatan jangka pendek yang disediakan pemerintah Indonesia untuk membantu penduduk yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Menurut Bappenas (1999) dalam (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002) program JPS dimaksudkan untuk : (a) memberikan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin, (b) memberikan peluang kerja produktif yang dapat memperbaiki daya beli masyarakat miskin, (c) memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin, (d) memulihkan jasa-jasa sosial dan ekonomi masyarakat miskin; dan (e) memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat miskin.

Program JPS terdiri atas empat aktivitas program, yaitu keamanan pangan, pendidikan perlindungan sosial, kesehatan dan pekerjaan umum padat karya. Aktivitas keamanan pangan ditujukan agar keluarga miskin mempunyai akses terhadap pangan dalam hal harga dan ketersediannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK), terutama beras (sekarang menjadi Raskin) dan memberdayakan petani untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional. Aktivitas pendidikan perlindungan sosial ditujukan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin dalam bentuk beasiswa dan bantuan keuangan operasional bagi lembaga pendidikan, rehabilitasi sekolah dasar dan pembangunan gedung sekolah baru. Aktivitas di sektor kesehatan, dengan memberi pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, bantuan kehamilan dan kelahiran serta pengasuhan anak bagi keluarga miskin, pemberian makanan tambahan bayi (6-11 bulan) dan anak-anak (12 -23 bulan) dari

keluarga miskin dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002)

Untuk aktivitas pekerjaan umum padat karya dirancang untuk membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli mereka. Program yang dikembangkan, yaitu *Pertama*, merancang kembali proyek yang sedang berjalan menjadi padat karya, dan *kedua*, membuat proyek khusus untuk menyerap tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran terampil. Namun proyek ini banyak mendapatkan kritikan, karena pendekatan dari kedua program ini bersifat departemental dan *top down*, sehingga pada bulan November 1998 pemerintah meluncurkan program ketiga yaitu Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan langsung ke masyarakat sesuai jumlah keluarga miskin dan pengangguran di desa masing-masing dan masyarakat diharapkan secara aktif memonitor jalannya program (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005. Pada permulaan BLT, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 14,442 triliun bagi 60 juta penduduk bidang kesehatan dan 40,6 juta penduduk untuk bidang pendidikan. Naum demikian, untuk lebih akuratnya data rumah tangga penerima BLT, pada bulan Oktober dan Desember 2005 BPS telah melakukan Survey untuk menentukan rumah tangga miskin (RTM) yang berhak menerima BLT dengan 14 Indikator. RTM dikatakan layak menerima BLT apabila memenuhi 9 indikator berikut :

1. Luas lantai (M^2); jika kecil dari $8 m^2$ / kapita
2. Luas lantai terluar; jira tanah/bambu/kayu koalitas rendah
3. Dinding rumah; jika dari bambu atau kayu berkualitas rendah
4. Fasilitas MCK, jira dipakai bersama/umum
5. Sumber air minum; jika sumur tak terlindungi/sungai/air hujan
6. Sumber penerangan; jika bukan dari listrik
7. Bahan bakar memasak; jika menggunakan kayu arang
8. Makan daging/minggu; jika tidak pernah atau satu kali
9. Makan per hari; jika hanya satu kali atau dua kali per hari
10. Pakaian baru/tahun/ anggota RT; jika hanya satu stel pakaian
11. Berobat ke Puskesmas/Poliklinik; jika tidak mampu berobat
12. Lapangan Pekerjaan RT; jika tidak bekerja
13. Pendidikan Kepala RT; jika hanya sampai SD
14. Barang dengan Nilai Rp. 500.000,- ; jika tidak memiliki barang tersebut.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan diluncurkannya KUR adalah (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit dengan pola penjaminan yang ditanggung oleh pemerintah sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah *feasible* namun *belum bankable* (Retnadi, 2008).

Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, skim KUR hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500 juta. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Presiden R.I mengarahkan agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5 juta.

Tabel 5.2. Persyaratan KUR s/d Rp. 500 Juta.

Uraian	Persyaratan
Calon debitur	Individu (perorangan/badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal s/d Rp. 500 Juta
Bentuk Kredit	Kredit Modal Kerja Menurun –maksimal 3 tahun Kredit Investasi – maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif 16% pa
Perizinan	s/d Rp. 100 Juta : SIUP, TDP & SITU atau surat keterangan dari lurah/kepala desa Rp. 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	Individu : KTP dan KK ; Kelompok : Surat Pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari kepala desa / kelurahan; Koperasi / badan usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai, proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank. Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : disalin dari Retnadi (2008)

Tabel 5.3. Persyaratan KUR Mikro s/d Rp. 5 Juta

Uraian	Persyaratan
Calon debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal s/d Rp. 5 Juta
Bentuk Kredit	Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi Menurun –maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 1,125 flate rate per bulan
Prov. dan Adm.	Tidak dipungut
Legalitas	KTP dan KK
Agunan	Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai, proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank. Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : disalin dari Retnadi (2008)

Kira-kira 6 bulan sejak diluncurkannya program KUR 5 November 2007 sudah tersalurkan kredit Rp. 6,8 Triliun dengan jumlah debitur 672.384 orang. Ini berarti rata-rata KUR yang diterima berjumlah 10,23 juta/orang seperti dirinci pada Tabel 5.4. dibawah ini.

Tabel 5.4 Realisasi Penyaluran KUR Nasional per Mei 2008

Bank	Total Kredit (Rp. Juta)	Total Debitur	Rata-rata Kredit Perdebitur Rp. Juta
BNI	911.871	7.413	123,01
BRI KUR	1.744.547	14.502	120,03
BRJ KUR Mikro	2.431.078	610.581	3,98
Mandiri	1.021.640	33.232	30,74
BTN	81.051	470	172,45
Bukopin	430.740	1.686	255,48
BSM	258.485	4.400	58,75
Total	6.879.412	672.284	10,23

Sumber : Kantor Menko Perekonomian (diolah oleh Retnadi, 2008)

Namun bukan berarti program KUR ini semuanya berjalan lancar dilapangan. Menurut Retnadi (2008) terdapat beberapa kendala dalam penyaluran KUR, yaitu :

- a. Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, dan beroperasinya para calo KUR Mikro.
- b. Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan seketika oleh perbankan namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini terjadi karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang sesuai.
- c. Adanya perubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya: kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, yang menyebabkan permintaan kredit menurun.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri

PNPM-Mandiri merupakan program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. PNPM-Mandiri

sebenarnya bukan hal baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. PNPM-Mandiri hanya mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai macam program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian/lembaga, demikian disampaikan oleh Menkokesra Aburizal Bakri kepada Jawa Pos, 22 Mei 2007.

Sejak dicanangkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, PNPM-Mandiri telah mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Pada tahun 2007 PNPM-Mandiri hanya meneruskan program yang sudah berjalan yaitu PPK dan P2KP, dan diperkuat program-program kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, PNPM Mandiri merupakan “gerakan nasional” yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Pada dasarnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui PNPM-Mandiri, didasarkan pada prinsip-prinsip :

- *Pemberdayaan masyarakat* (community driven development), penguatan ekonomi lokal/kerakyatan, dan kegiatan padat karya;
- *Prioritas*, kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa/kampung-kampung yang paling miskin.
- *Partisipatif*, melibatkan semua penduduk desa/kelurahan;
- *Transparansi*;
- *Open menú*, kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam *negative list*,
- *Kompetitif*, desa-desa dalam kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*.

- *Desentralisasi*, manajemen dan pengambilan keputusan pada tingkat lokal.
- *Sederhana*, tidak ada prosedur yang kompleks;
- *Pendanaan*; cost-sharing antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat

Keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Disadari bahwa penanggulangan kemiskinan akan dapat mencapai hasil yang optimal jika telah mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, program PNPM-Mandiri telah berupaya mengkomodir partisipasi masyarakat melalui pendekatan :

- Berbasis kecamatan sebagai lokus program;
- Masyarakat sebagai pelaku utama, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan;
- Adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan;
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah;
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.

Selain itu, dalam implemetasi program didukung oleh beberapa komponen utama, yaitu :

- *Pengembangan masyarakat*, yaitu kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat melalui refleksi kemiskinan, pemetaan masalah, potensi dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;

- *Bantuan Langsung Masyarakat*, memberikan dana stimulan sebagai sarana untuk mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat. Khusus untuk desa-desa tertinggal dialokasikan dana Rp. 250 juta perdesa;
- *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan*, pendampingan untuk pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat;
- *Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program*, kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan program, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi, serta untuk penyempurnaan dan pengembangan program.

PNPM-Mandiri rencananya akan dilaksanakan minimal hingga tahun 2015, sejalan dengan kesepakatan Indonesia untuk MDGs. Sementara itu, perkembangan cakupan wilayah yang telah dan akan diberdayakan pada tahun 2007 sebanyak 2.827 Kecamatan (1993 Kecamatan di Perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan) atau sekitar 50.000 desa, tahun 2008 dengan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga menjadi 3.800 Kecamatan dan tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 Kecamatan) akan mendapat PNPM-Mandiri.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Analisis Statistik

Dalam bab ini akan disampaikan hasil analisis ekonometrik pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effects*, pada awalnya analisis regresi dilakukan terhadap 26 propinsi di Indonesia dengan asumsi mewakili kondisi secara nasional dan kemudian secara terpisah dilakukan analisis regresi terhadap propinsi-propinsi yang berada di pulau Sumatera dan Jawa. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilaporkan melalui uji t , sedangkan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilaporkan melalui uji F . Uji kesesuaian model dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) dan terakhir analisis dilakukan untuk melihat apakah model yang digunakan memenuhi asumsi klasik model regresi.

a. Uji secara parsial (Uji t)

Dalam Tabel 6.1 dilaporkan estimasi koefisien regresi data panel dengan metode *fixed effects* untuk 26 propinsi di Indonesia. Pada persamaan (i) dan (iii), variabel *incsh* dan indeks gini sebagai variabel bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat LPDRB. Nilai t_{hitung} variabel *Incsh* 5,873 dan indeks gini 6.196 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,980 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga pengaruh variabel *Incsh* dan indeks gini terhadap variabel LPDRB signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Sedangkan variabel

Middle pada persamaan (ii) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel LPDRB pada derajat kepercayaan 5%. Koefisien regresi variabel Middle bernilai - 0,178 yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Middle atau jumlah penduduk berpendapatan 40% sedang sebesar 1% secara signifikan akan menurunkan variabel LPDRB sebesar 0,178 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Tabel 6.1. Hasil Regresi untuk Pertumbuhan PDRB Per Kapita 26 Propinsi di Indonesia.

Variabel Independen	Persamaan Regresi		
	(i)	(ii)	(iii)
Constant (masing-masing daerah)	Lihat Lampiran 1	Lihat Lampiran 1	Lihat Lampiran 1
Incsh (20%tinggi)	0.302 (5.873)*		
Middle (40%sedang)		-0.178 (-3.436)*	
Indeks gini (gnrt)			0.321 (6.196)*
Pov (kemiskinan)	-0.568 (-10.976)*	-0.612 (-10.899)*	-0.559 (-10.797)*
Jumlah observasi	156	156	156
R ²	0.506	0.461	0.510
DW	1.973	1.893	1.981
SEE	0.832	0.850	0.827

Sumber : Hasil perhitungan regresi data panel dengan metode *fixed effects*, nilai t-hitung ditunjukkan di dalam tanda (.....), SEE = *standar error of the estimate*; DW : Statistik uji Durbin Watson; * = signifikan pada level kepercayaan 5%

Variabel Pov (kemiskinan), baik persamaan (i), (ii) dan (iii), semuanya menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel LPDRB. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} berturut - turut dari persamaan (i), (ii), dan (iii) -10,976, -10,899 dan -10,797 yang lebih kecil dari t_{tabel} 1,980. Artinya

peningkatan angka kemiskinan akan menurunkan pertumbuhan PDRB per kapita secara signifikan. Selain itu, estimasi koefisien intersep masing-masing unit cross section (daerah) yang berbeda-beda mengindikasikan bahwa setiap daerah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan PDRB perkapita jika tidak dipengaruhi oleh variabel independen (pov, incsh, middle dan indeks gini).

Tabel 6.2. Hasil Regresi untuk Pertumbuhan PDRB Per Kapita 8 Propinsi di Pulau Sumatera.

Variabel Independen	Persamaan Regresi		
	(i)	(ii)	(iii)
Constant (masing-masing daerah)	Lihat Lampiran 2	Lihat Lampiran 2	Lihat Lampiran 2
Incsh (20%tinggi)	0.372 (4.395)*		
Middle (40%sedang)		-0.222 (-2.723)*	
Indeks gini (gnrt)			0.372 (4.159)*
Pov (kemiskinan)	-0.602 (-8.006)*	-0.651 (-7.416)*	-0.599 (-7.556)*
Jumlah observasi	48	48	48
R ²	0.600	0.594	0.308
DW	2.427	2.292	2.347
SEE	0.790	0.810	0.784

Sumber : Hasil perhitungan regresi data panel dengan metode *fixed effects*, nilai t-hitung ditunjukkan di dalam tanda (.....), SEE = *standar error of the estimate*; DW : Statistik uji Durbin Watson; * = signifikan pada level kepercayaan 5%

Untuk regresi di pulau Sumatera dilaporkan dalam Tabel 6.2 Pada persamaan (i) dan (iii), variabel incsh dan indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel LPDRB. Sedangkan variabel Middle berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel LPDRB. Selain itu variabel Pov di ketiga persamaan juga menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan. Artinya jika

terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 1% di pulau Sumatera, maka secara signifikan akan menurunkan pertumbuhan PDRB per kapita dari ketiga persamaan rata-rata 0,6% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Tabel 6.3. Hasil Regresi untuk Pertumbuhan PDRB Per Kapita 5 Propinsi di Pulau Jawa

Variabel Independen	Persamaan Regresi		
	(i)	(ii)	(iii)
Constant (masing-masing daerah)	Lihat Lampiran 3	Lihat Lampiran 3	Lihat Lampiran 3
Insh (20%tinggi)	0.212 (2.869)*		
Middle (40%sedang)		-0.040 (-0.485)	
Indeks gini (gnrt)			0.204 (2.752)*
Pov (kemiskinan)	-0.800 (-12.531)*	-0.865 (-13.093)*	-0.794 (-11.895)*
Jumlah observasi	30	30	30
R ²	0.808	0.764	0.802
DW	2.329	2.081	2.356
SEE	0.671	0.689	0.673

Sumber : Hasil perhitungan regresi data panel dengan metode *fixed effects*, nilai t-hitung ditunjukkan di dalam tanda (.....), SEE = *standar error of the estimate*; DW : Statistik uji Durbin Watson; * = signifikan pada level kepercayaan 5%

Tabel 6.3. melaporkan hasil regresi untuk 5 propinsi di pulau Jawa. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel LPDRB di ketiga persamaan. Nilai t_{hitung} variabel kemiskinan berturut-turut mulai dari persamaan (i), (ii), dan (iii) adalah -12,531, -13,093 dan -11,895 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,042 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti signifikan. Sedangkan variabel Insh dan Indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel LPDRB, sedangkan variabel Middle berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan.

b. Uji Serempak (Uji F)

Uji F melihat secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Uji F (lihat Tabel 6.4) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel kemiskinan, distribusi pendapatan 20% tinggi dan indeks gini berpengaruh signifikan terhadap variabel LPDRB, baik analisis secara nasional maupun dipulau Sumatera dan Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (F-statistic) jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}

Tabel 6.4. Hasil Perhitungan Uji F

Model Regresi	Nilai F_{hitung}	F_{tabel}	Prob (F-statistic)	Analisis	Kesimpulan
<u>26 Propinsi</u>					
(i)	4,847	3,07	0.000000	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(ii)	4,047	3,07	0.000000	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(iii)	4,927	3,07	0.000000	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
<u>Pulau Sumatera</u>					
(i)	6.325	3.24	0.000020	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(ii)	6.175	3.24	0.000025	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(iii)	5.870	3.24	0.000042	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
<u>Pulau Jawa</u>					
(i)	16.174	3.35	0.000000	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(ii)	12.398	3.35	0.000003	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan
(iii)	15.561	3.35	0.000000	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Signifikan

Sumber : hasil perhitungan; (i) Incsh dan Pov; (ii) Middle dan Pov; dan (iii) Indeks Gini dan Pov.

c. Pengujian kesesuaian Model (R^2)

Korelasi seluruh variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Dalam Tabel 6.1, persamaan (i), nilai R^2 sebesar 0,505. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel Incsh dan Pov mampu menjelaskan variasi variabel LPDRB sebesar 50,5 %, sedangkan 49,5% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya

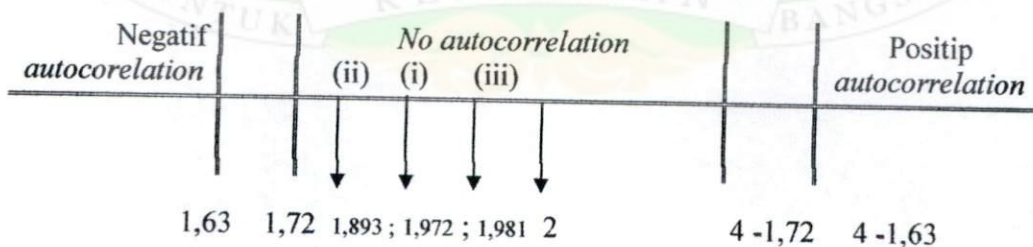
yang tidak dimasukkan kedalam model. Sama halnya dengan persamaan (ii) dan (iii), nilai R^2 berturut-turut 0,461 dan 0,510. Artinya variasi variabel LPDRB yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam persamaan (ii) dan (iii) tersebut berturut-turut sebesar 46,10% dan 51%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Interpretasi yang sama juga berlaku untuk nilai R^2 pada persamaan regresi dalam Tabel 6.2 dan Tabel 6.3.

6.2. Uji Asumsi Klasik

6.2.1. Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau korelasi serial dalam suatu model regresi digunakan nilai statistik Durbin Watson (DW). Dalam Tabel 6.1, ketiga model persamaan regresi dari 26 propinsi di Indonesia mempunyai nilai Durbin Watson (DW) berturut-turut 1,937, 1,904 dan 1,955. Nilai-nilai DW tersebut semuanya mendekati atau disekitar angka 2 yang berarti bahwa ketiga model tersebut dapat disimpulkan tidak mempunyai atau terbebas dari autokorelasi, karena angka 2 berada di daerah *no autocorrelation* seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.1.

Gambar 6.1. Penentuan Letak Statistik Uji Durbin Watson (DW)



Penentuan letak nilai-nilai DW pada Gambar 6.1. diperoleh dengan bantuan Tabel d_l dan d_u dibantu dengan k (*jumlah variabel independen*) dan $n =$ *jumlah observasi*. Untuk model persamaan dalam Tabel 6.1 diperoleh nilai $d_l = 1,63$ dan nilai $d_u = 1,72$ sehingga nilai-nilai DW dari ketiga model tersebut terlihat letaknya pada daerah *no autocorrelation*. Oleh sebab itu, cara mudah untuk mempercepat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat patokan nilai DW hitung mendekati atau disekitar angka 2. Untuk model persamaan regresi di pulau Sumatera (Tabel 6.2) dan Jawa (Tabel 6.3) mempunyai nilai Durbin Watson (DW) mendekati atau disekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mempunyai atau terbebas dari masalah autokorelasi.

6.2.2. Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya kolinieritas antara sesama variabel independen dalam model yang diestimasi. Masalah multikolinieritas ini biasanya muncul karena jumlah observasinya sedikit. Namun dengan regresi data panel masalah tersebut dapat diatasi karena meningkatnya jumlah observasi.

Untuk mendeteksi masalah multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari perbandingan nilai R^2 model awal yang diestimasi dengan nilai R^2 model regresi parsial antara sesama variabel independen. Jika nilai R^2 model awal (lihat lampiran 1, 2 dan 3) lebih besar dari nilai R^2 model regresi parsial antara sesama variabel independen, maka dapat dikatakan gejala multikolinieritas berderajat rendah atau tidak ada sama sekali. Dari hasil regresi secara parsial antara variabel independen, baik analisis secara nasional, maupun dipulau Sumatera dan Jawa

diperoleh nilai R^2 yang lebih kecil dari nilai R^2 model awal yang diestimasi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (lihat lampiran 4,5 dan 6).

6.2.3. Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah melihat ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Heteroskedastisitas adalah menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu observasi dengan observasi lainnya. Salah satu cara memprediksi ada atau tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dapat dilakukan melalui uji *Park* dengan melakukan estimasi yang menggunakan regresi bantuan menggunakan nilai logaritma dari residual kuadrat sebagai variabel dependen.

Dari hasil estimasi persamaan regresi bantuan (Lampiran 7, point a), diperoleh nilai χ^2 -hitung = $(n-2).R^2 = 154 \cdot 0,259868 = 40,02$, sedangkan nilai χ^2 -tabel = 124,342. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa χ^2 -hitung lebih kecil dari χ^2 -tabel, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas dalam model yang digunakan atau bersifat homoskedastisitas. Analisis dan kesimpulan yang sama juga berlaku untuk hasil uji heteroskedastisitas dalam Lampiran 8 dan Lampiran 9.

6.3. Analisis dan Diskusi

Analisis Secara Nasional

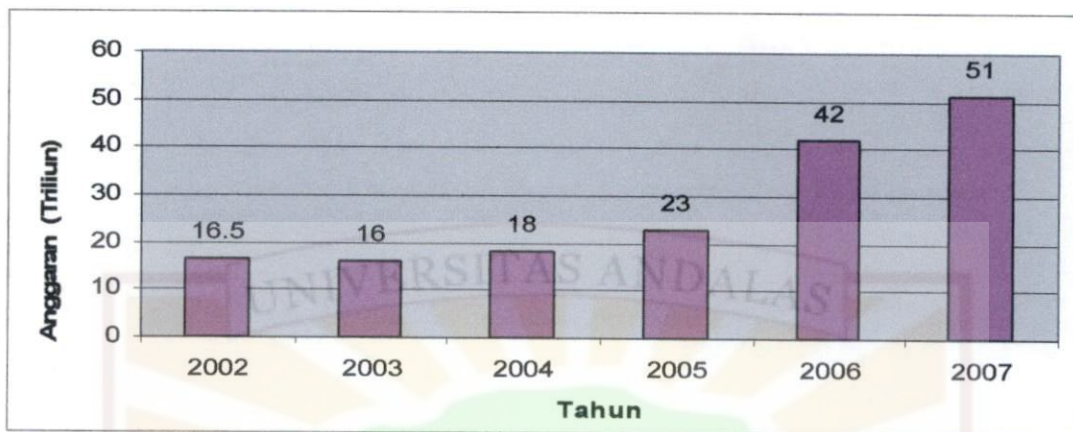
Pengujian empiris ini menemukan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia dalam periode analisis menimbulkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita dapat dibuktikan. Analisis pada masing-masing pulau (Sumatera dan Jawa) juga menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Temuan ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa kemiskinan merupakan faktor penghambat (berpengaruh negatif) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut Sigit (1997) adanya kemiskinan ditengah kemajuan ekonomi, akan dapat membawa dampak sosial politik yang justru sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. Selain itu, Bhatta (2001) menyatakan bahwa kemiskinan berasosiasi negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Dan ditambahkan oleh Jhingan (2004) bahwa kemiskinan dapat menyebabkan keterbelakangan ekonomi, dapat berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, adanya berbagai faktor yang tidak *mobile*, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi.

Kemiskinan juga membawa dampak terhadap meningkatnya beban anggaran pengeluaran pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 6.2). Hal ini juga dapat mengurangi biaya belanja modal bagi pemerintah untuk investasi. Selain itu, kemiskinan yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh sosial politik yang berujung kepada konflik-konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Rasa tidak puas masyarakat terutama yang miskin terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi membuat situasi yang tidak kondusif untuk iklim investasi, akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat.

Gambar 6.2. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Keadaan Tahun 2002 – 2007.



Sumber : TKPK dan Bappenas, disalin dari Royat (2008)

Pengujian empiris terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 40% sedang menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Hal ini dapat disebabkan karena bagian 40% penduduk berpendapatan sedang atau dianggap kelompok penduduk berpendapatan menengah (kebanyakan menengah ke bawah) lebih rentan terhadap guncangan pendapatan. Jika saja terjadi guncangan pendapatan, misalnya kenaikan tingkat inflasi, kenaikan BBM, bencana alam, konflik-konflik sosial, menyebabkan pendapatan mereka bisa dekat ke garis kemiskinan atau bahkan bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Keadaan inilah yang dikategorikan sebagai *transient poverty* sebagaimana dibahas dalam Bab IV. Selain itu, mungkin juga disebabkan karena kemampuan menabung yang rendah karena penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup, sehingga tidak dapat ikut berinvestasi membangun perekonomian.

Hasil pengujian empiris menggunakan variabel distribusi pendapatan 20% tinggi (*incsh*) dan indeks gini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia. Temuan ini menunjukkan

bahwa distribusi pendapatan 20% tinggi sebagai cerminan dari kelompok penduduk yang berpenghasilan tinggi atau kaya, keberadaan mereka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB perkapita Indonesia. Karena mereka mempunyai kemampuan dan kecendrungan yang lebih tinggi untuk menabungkan sebagian kekayaan mereka untuk diinvestasikan kembali membangun perekonomian. Sebagaimana dilaporkan oleh Dynan *et al.* (2004) dalam Malinen (2007) bahwa orang kaya tingkat tabungannya lebih tinggi daripada yang miskin. Sedangkan menurut Kaldor (1956) dalam Yamamura (2008) bahwa *ketimpangan pendapatan* bekerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya akumulasi modal melalui tabungan.

Sebenarnya arah pengaruh yang diharapkan dari kedua variabel (indeks gini dan incsh) tersebut yang diduga dalam hipotesis penelitian ini adalah negatif. Tetapi dari hasil pengujian ditemukan arah yang positif. Hal ini diduga disebabkan karena Indonesia masih dalam tahap perekonomian yang sedang berkembang. Sesuai dengan pendapat Malinen (2007) bahwa perbedaan pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung (*depends on*) pada tingkat perkembangan perekonomian. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif di perekonomian yang sedang berkembang, dan berpengaruh negatif pada perekonomian yang lebih maju. Selain itu, berdasarkan pendapat Forbes (2000) bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria indeks gini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengujian empiris kedua ukuran ketimpangan yang berbeda tersebut, semakin jelaslah bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia membawa dampak positif bagi pertumbuhan PDRB per kapita. Hal ini dapat disebabkan

karena investasi dari golongan kaya menyebabkan terjadinya *trickle down efek* kepada golongan menengah dan miskin. Temuan ini diperkuat dari fakta perkembangan indeks gini yang menunjukkan adanya kecenderungan memburuknya distribusi pendapatan selama 15 tahun terakhir. Indeks gini meningkat dari 0,308 tahun 1999 menjadi 0,364 tahun 2007. Indeks gini sebesar 0,364 sudah tergolong tingkat *ketimpangan sedang*, yang berarti tingkat distribusi pendapatan antar penduduk di Indonesia semakin melebar.

Analisis Secara Pulau

Hasil analisis secara pulau menunjukkan arah yang konsisten dengan hasil analisis secara nasional. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat signifikansinya, begitu juga perbandingan analisis antara pulau Sumatera dan Jawa. Pengaruh variabel kemiskinan di pulau Sumatera dan Jawa terhadap pertumbuhan PDRB per kapita sama- sama menunjukkan arah yang negatif dan signifikan. Sama halnya dengan pengaruh variabel middle juga konsisten dengan analisis secara nasional, tetapi di pulau Sumatera pengaruhnya signifikan sedangkan di pulau Jawa tidak signifikan. Perbedaan signifikansi variabel middle antara pulau Sumatera dan Jawa ini diduga disebabkan tingkat kemajuan perekonomian antara kedua pulau tersebut. Pulau Jawa dapat dikatakan lebih maju dari pulau Sumatera, sehingga pengaruh negatif variabel middle (bagian 40% penduduk berpendapatan sedang) tidak signifikan menurunkan pertumbuhan PDRB per kapita di Pulau Jawa. Sedangkan pengaruh variabel indeks gini dan distribusi pendapatan 20% tinggi di pulau Jawa dan Sumatera terhadap pertumbuhan PDRB perkapita juga konsisten dengan analisis secara nasional. Hal ini berarti bahwa pengaruh distribusi pendapatan, terutama keberadaan lapisan penduduk berpendapatan tinggi di pulau

BAB VII. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Terkait dengan hasil penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, baik secara nasional, maupun di pulau Sumatera dan Jawa, diperlukan paket kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Disamping meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang sudah ada seperti program-program pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam PNPM-Mandiri, ke depan perlu adanya kebijakan yang menjamin perolehan pendapatan bagi penduduk miskin. Misalnya kebijakan pemberian tunjangan pendapatan bagi penduduk miskin dan atau rumah tangga miskin. Besarnya tunjangan tersebut minimal dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan diberikan dalam jangka waktu tertentu sehingga pada akhirnya kesejahteraan mereka meningkat dan diharapkan dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin, dapat juga dilakukan melalui pembukaan kesempatan kerja baru melalui kebijakan fiskal. Mengingat penduduk miskin lebih banyak diperdesaan maka kebijakan fiskal pemerintah perlu diarahkan lebih banyak kepada proyek-proyek padat karya di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dan agroindustri diperdesaan. Dengan terbukanya kesempatan kerja baru, maka daya beli masyarakat miskin akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dari upah. Daya beli yang meningkat akan memicu penawaran barang-barang konsumsi sehingga produksi pun akan meningkat di perdesaan dan pada akhirnya perekonomian perdesaan dapat tumbuh memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa secara nasional dan di pulau Sumatera dan Jawa, ketimpangan distribusi pendapatan menurut kriteria indeks gini dan distribusi pendapatan 20% tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kontribusi positif dari lapisan penduduk berpendapatan tinggi terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita, karena distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria indeks gini cenderung semakin timpang. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif bagi kelompok penduduk berpendapatan tinggi, misalnya kebijakan yang memberikan kemudahan dalam perizinan dan kebijakan insentif perpajakan (*tax holiday*), baik Pajak Pertambahan Nilai (PPn), maupun Pajak Penghasilan (PPh) termasuk PPnBM.

Disamping menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kelompok penduduk berpendapatan tinggi, pemerintah perlu meregulasi agar investasi tersebut diarahkan kepada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya), misalnya di bidang agroindustri, yang juga didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah seperti disebutkan sebelumnya. Meningkatnya investasi akan tumbuh permintaan untuk faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah dan bahan baku. Pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, karena terbuka berbagai peluang usaha produktif dalam penyediaan bahan baku, dan pendapatan dari upah. Dengan demikian investasi dari golongan penduduk berpendapatan tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan *trickle down efek* ke golongan penduduk berpendapatan menengah dan masyarakat miskin.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Analisis Secara Nasional

- (a) Bagian distribusi pendapatan penduduk 20% tinggi (*incsh*) dan indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia;
- (b) Bagian distribusi pendapatan penduduk 40% sedang (*middle*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia
- (c). Kemiskinan (*pov*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia

Analisis Secara Pulau

- (a) Bagian distribusi pendapatan penduduk 20% tinggi (*incsh*) dan indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Pulau Sumatera dan Jawa.
- (b) Bagian distribusi pendapatan penduduk 40% sedang (*middle*) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, akan tetapi di pulau Sumatera pengaruhnya signifikan sedangkan di pulau Jawa pengaruhnya tidak signifikan.
- (c) Kemiskinan (*pov*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di pulau Sumatera dan Jawa.

8.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka peneliti menyarankan :

- (a). Karena kemiskinan membawa pengaruh negatif terhadap usaha meningkatkan perekonomian, maka pemerintah perlu meningkat komitmen dan koordinasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar lembaga pemerintah. Hal ini dianggap penting karena faktanya komitmen dan koordinasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut dianggap masih rendah. Karena baru 316 Kab./Kota yang sudah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan baru 95 Kab/Kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sampai tahun 2008. Padahal jumlah Kab/Kota di Indonesia sampai bulan Desember 2007 menurut BPS (2008) sebanyak 465 Kab./Kota
- (b). Terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung, agar sasaran kebijakan pemerintah perlu memperhatikan jenis kemiskinan yang dialami oleh orang miskin (kemiskinan kronis atau sementara), karena kebijakan untuk menanggulangi kedua jenis kemiskinan tersebut dapat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, Montek. (1976). *Income distribution and development : some stylized facts*. American Economic Review. Pappers and Proceedings, page :128 – 135.
- Alesina, A., and Perotti, R. (1993). *Income distribution, political instability, and investment*, NBER Working Paper; 4486; Oktober.
- Alesina, A., and Rodrik, D. (1994). *Distributive policies and economic growth*. Quartely Journal of Economics, 109 (2). Page 465-490.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFPE. Yogyakarta.
- Adelman, I. and Yeldan, E. (2000). *Is this the end of economic development?* Structural Change and Economic Dynamics 11, page 95-109.
- Asian Development Bank. (). *The Challenge of poverty reduction*. didownload dari www.adb.or.id .
- Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). *Occupational choice and the process of development*. Journal of Political Economy, 101(2), 274–298.
- Brenner, Y.S (1995). *The Tricky problem of distribution*, dalam Brenner, Y.S, Theory of Income and Wealth, New York, ST Martin Press.
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Data dan Informasi Kemiskinan 2005 dan 2006*. BPS. Jakarta
- _____ (2008). *Perkembangan beberapa indikator utama sosial ekonomi Indonesia (Trend of the selected socio-economics indicators of Indonesia)*. Jakarta, Maret.
- Bhatta, S.A. (2001). *Are inequality and poverty harmful for economic growth: Evidence from the metropolitan areas of the United States*. Journal of Urban Affairs. Vol. 23, Iss. 3/4; page. 335.
- Bigsten, A., Kebede, B., Shimeles, A., and Taddese, M. (2003). *Growth and Poverty Reduction in Ethiopia : Evidence from Household Panel Surveys*. World Development Vol.31, No. 1, page : 87 – 106.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2004). *Kekerasan dan Kemiskinan*. Artikel Pasti. Edisi 25 Th IX Mei, Yogyakarta.
- Cashin, P., Mauro, P., and Sahay, R. (2001). *Macroeconomic policies and poverty reduction : Some cross-country evidence*. Finance and Development;Jun;38;2 ABI/INFORM Research page 46-49.

- Dollar, D., and Kraay, A. (2001). *Growth Is Good for the Poor*. World Bank Policy Research Working Paper No.2587. Washington.
- Dhanani, S. and Islam, I. (2002). *Poverty Vulnerability and Social Protection in a Period Of Crisis : The Case Of Indonesia*. World Development Vol. 30, No. 7, page 1211 – 1231.
- Dillon, H.S. (2004). *Paradigma Ekonomi yang Pro- Kaum Miskin dan Pro-Keadilan : Belajar dari Kesalahan Masa Lalu*. Artikel Penelitian, Jakarta.
- Forbes, K.J. (2000). *A Reassessment of the relationship between income inequality and growth*. The American Economic Review; Mar; 90; 4; ABI/INFORM Research page 869-887.
- Fritzen, Scott. (2002). *Growth, inequality and the future of poverty reduction in Vietnam*. Journal of Asian Economics 13, page 635 - 657.
- Frazer, Garth. (2006). *Inequality and development across and within countries*. World Development Vol. 34, No. 9, page 1459-1481.
- Gujarati, Damodar. (1978). *Ekonometerika dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hailu, Y.G., Kahsai, M.S., Gebremedhin. T.G., and Jackson. R.W., (2009). *Is Income Inequality Endogenous in Regional Growth?* Selected Paper for presentation at the Southern Agricultural Economics Association. Annual Meeting, Atlanta, Georgia, Janury 31- February 3.
- Harian Media Indonesia (2009). *RAPBN 2010 dan Jerat Involusi Kemiskinan*. 6 Agustus hal 10. (Opini dari Budimanta, Arif : Direktur Megawati Institute)
- Jawa Pos Online. (2007). *Mencermati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. 23 Mei.
- Kuznets, S. (1955). *Economic growth and income inequality*. The American Economic Review, Vol. 45, Issue 1, (Mar.), page 1-28.
- Kartasmita, Ginandjar. (1996) *Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Penerbit PT Pustaka CIDESINDO. Yakarta.
- Kim, Kwan S. (1997). *Income distribution and poverty : an interrregional comparison*. World Development Vol. 25, No. 11, page 1909 -1924.
- Khan, M.H. (2000). *Rural poverty in developing countries*. Finance and Development; Dec; 37; 4 ABI/INFORM Research; page 26-29.

- Kusnanto, Heri (2002). *Regional differences in the impact of the economic crisis and social safety net on child nutrition in Indonesia*. UGM. Yogyakarta.
- Kaasa, Anneli. (2005). *Factors of income inequality and their influences mechanisms : an theoretical overview*. Tartu University Press. online available at <http://www.tyk.ut.ee/febawb40.pdf>. accessed March 10, 2009
- Mehanna, Rock-Antoine. (2004). *Poverty and economic development : not as direct as it may seem*. Journal of Socio-Economics 33, page 217 -228.
- Malinen, Tuomas. (2007). *A comment on the relationship between inequality and growth*. Discussion Paper No.632. University of Helsinki. June 15.
- Newbery, David. (1970). *A Theorem on The Measurement of Inequality*. Journal of Economic Theory 2; page 264 – 266.
- Narayan, D. (2000). *Poverty is powerlessness and voicelessness*. Finance and Development; Dec; 37; 4; ABI/INFORM Research page 18 -21.
- Nissanke, M. and Thorbecke, E. (2006). *Channel and policy debate in the globalization_inequality_poverty nexus*. World Development. Vol. 34.No.8,page 1338-1360
- Persson, T., and Tabellini, G. (1994). *Is Inequality harmful for growth?*. The American Economic Review; Jun; 84,3;ABI/INFORM Research page. 600.
- Pfeffermann, G. (2001). *Poverty reduction in developing countries : The role of private enterprise*. Finance and Development;Jun;38;2 ABI/INFORM Research page 42-44.
- Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Di download dari www.bappenas.go.id
- Repelita I – VI Indonesia. Didownload dari [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 – 2009. Didownload dari [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Remi, S.S dan Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Ravallion, Martin. 2006. *Looking Beyond Averages in The Trade and Poverty Debate*. World Development Vol.34 No. 8 page : 1374 – 1392.
- Retnadi, Djoko. (2008). *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. Economic Review. No.212. Juni.
- Royat, Sujana (2008). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Didownload dari [www. google.com](http://www.google.com)

- Sigit, Hananto, 1997, "*Kemiskinan dan Ketimpangan Pembagian Pendapatan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*", *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian tentang strategi Pembangunan Kesejahteraan sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Suyono, Haryono. (2009) *Mengenang Almarhum Bapak. H.M. Soeharto*. Damandiri. Gemari Edisi 96 tahun XI. Januari.
- World Development Report. 1990. *Poverty*. Published World Bank Oxford University Press, PUB8507.
- Widodo, Hg.S.T., (1996) *Ekonomi Indonesia : Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Werry Darta Taifur. (2005). *Tinjauan Teoritis Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Yang Berpihak Kepada Penduduk Miskin*. Makalah Seminar Keberpihakan Pertumbuhan Ekonomi Kepada Kelompok Miskin. Padang
- Yamamura, Eiji and Shin, Inyong. (2008). *Effects of Income Inequality on Growth through efficiency Improvement and Capital Accumulation*. MPRA Paper No. 10220, posted 28. August 2008 / 16:31. didownload dari : <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10220/>. accessed March 10, 2009.



Lampiran 1. Hasil regresi data panel dengan metode *fixed effects* terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 26 Propinsi di Indonesia

a. Persamaan (i) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 Incsh_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 11/19/09 Time: 06:56
 Sample: 1 6
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 26
 Total panel (balanced) observations: 156
 One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	0.302001	0.051418	5.873399	0.0000
POV?	-0.568034	0.051754	-10.97566	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.001450			
_SUMUT--C	-0.001163			
_SUMBAR--C	0.002170			
_RIAU--C	5.26E-18			
_JAMBI--C	-0.000443			
_SUMSEL--C	-0.002613			
_BENGKULU--C	0.001450			
_LAMPUNG--C	0.002170			
_JKT--C	0.000443			
_JABAR--C	-0.002110			
_JATENG--C	-0.002110			
_YOGYA--C	-0.001667			
_JATIM--C	-0.000947			
_BALI--C	0.003283			
_NTB--C	0.000503			
_NTT--C	0.002613			
_KALBAR--C	0.000503			
_KALTENG--C	-2.29E-17			
_KALSEL--C	0.000947			
_KALTIM--C	-0.000947			
_SULUT--C	-0.000443			
_SULTENG--C	0.000503			
_SULSEL--C	0.000947			
_SULTRA--C	0.001163			
_MALUKU--C	-0.002613			
_PAPUA--C	-3.18E-17			

Weighted Statistics

R-squared	0.505536	Mean dependent var	-0.000202
Adjusted R-squared	0.401234	S.D. dependent var	1.074914
S.E. of regression	0.831768	Sum squared resid	88.55516
F-statistic	4.846886	Durbin-Watson stat	1.972896
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.241496	Mean dependent var	-5.77E-05
Adjusted R-squared	0.081500	S.D. dependent var	0.915737
S.E. of regression	0.877628	Sum squared resid	98.58961
Durbin-Watson stat	1.789275		

b. Persamaan (ii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 06:57

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	-0.178242	0.051867	-3.436506	0.0008
POV?	-0.612338	0.056183	-10.89904	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.000426			
_SUMUT--C	-0.001964			
_SUMBAR--C	0.001667			
_RIAU--C	0.000297			
_JAMBI--C	-0.000723			
_SUMSEL--C	-0.002687			
_BENGKULU--C	0.001021			
_LAMPUNG--C	0.001667			
_JKT--C	0.001318			
_JABAR--C	-0.002687			
_JATENG--C	-0.002687			
_YOGYA--C	-0.001370			
_JATIM--C	-0.000723			
_BALI--C	0.002854			
_NTB--C	-4.43E-17			
_NTT--C	0.002687			
_KALBAR--C	0.000297			
_KALTENG--C	-1.34E-17			
_KALSEL--C	0.001021			
_KALTIM--C	-0.001021			
_SULUT--C	-0.000723			
_SULTENG--C	-1.51E-18			
_SULSEL--C	0.018251			
_SULTRA--C	0.020679			
_MALUKU--C	-0.002390			
_PAPUA--C	-0.000297			
Weighted Statistics				
R-squared	0.460524	Mean dependent var		-0.000207
Adjusted R-squared	0.346728	S.D. dependent var		1.051472
S.E. of regression	0.849855	Sum squared resid		92.44852
F-statistic	4.046929	Durbin-Watson stat		1.893073
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.214702	Mean dependent var		-5.77E-05
Adjusted R-squared	0.049054	S.D. dependent var		0.915737
S.E. of regression	0.892995	Sum squared resid		102.0723
Durbin-Watson stat	1.739390			

c. Persamaan (iii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Indeks Gini}_{it} + \beta_2 \text{ Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 06:57

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	0.320991	0.051804	6.196211	0.0000
POV?	-0.558918	0.051768	-10.79665	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.001467			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	0.001667			
_RIAU--C	0.000535			
_JAMBI--C	-0.001467			
_SUMSEL--C	-0.002598			
_BENGKULU--C	0.000932			
_LAMPUNG--C	0.001667			
_JKT--C	0.001467			
_JABAR--C	-0.002598			
_JATENG--C	-0.002598			
_YOGYA--C	-0.001667			
_JATIM--C	-0.001467			
_BALI--C	0.002765			
_NTB--C	0.000535			
_NTT--C	0.002598			
_KALBAR--C	-1.83E-17			
_KALTENG--C	-1.14E-17			
_KALSEL--C	0.000932			
_KALTIM--C	-0.000397			
_SULUT--C	-0.000932			
_SULTENG--C	-1.49E-17			
_SULSEL--C	0.000932			
_SULTRA--C	0.001667			
_MALUKU--C	-0.003133			
_PAPUA--C	-3.18E-17			
Weighted Statistics				
R-squared	0.509621	Mean dependent var		-0.000190
Adjusted R-squared	0.406182	S.D. dependent var		1.073220
S.E. of regression	0.827019	Sum squared resid		87.54686
F-statistic	4.926768	Durbin-Watson stat		1.981496
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.257062	Mean dependent var		-5.77E-05
Adjusted R-squared	0.100349	S.D. dependent var		0.915737
S.E. of regression	0.868576	Sum squared resid		96.56635
Durbin-Watson stat	1.796914			

Lampiran 2. Hasil regresi data panel dengan metode *fixed effects* terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 8 Propinsi di Pulau Sumatera

a. Persamaan (i) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 Incsh_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:21

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	0.372176	0.084670	4.395596	0.0001
POV?	-0.602446	0.075247	-8.006269	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.001624			
_SUMUT--C	-0.001046			
_SUMBAR--C	0.002287			
_RIAU--C	5.57E-18			
_JAMBI--C	-0.000384			
_SUMSEL--C	-0.002671			
_BENGKULU--C	0.001624			
_LAMPUNG--C	0.002287			
Weighted Statistics				
R-squared	0.599672	Mean dependent var		-0.000142
Adjusted R-squared	0.504857	S.D. dependent var		1.122896
S.E. of regression	0.790142	Sum squared resid		23.72430
F-statistic	6.324672	Durbin-Watson stat		2.426960
Prob(F-statistic)	0.000020			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.357428	Mean dependent var		-3.47E-18
Adjusted R-squared	0.205240	S.D. dependent var		0.922296
S.E. of regression	0.822220	Sum squared resid		25.68976
Durbin-Watson stat	2.597315			

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Persamaan (ii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:20

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	-0.221745	0.081436	-2.722923	0.0097
POV?	-0.650474	0.087717	-7.415638	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.000345			
_SUMUT--C	-0.002036			
_SUMBAR--C	0.001667			
_RIAU--C	0.000370			
_JAMBI--C	-0.000715			
_SUMSEL--C	-0.002751			
_BENGKULU--C	0.001084			
_LAMPUNG--C	0.001667			
Weighted Statistics				
R-squared	0.593943	Mean dependent var		-0.000196
Adjusted R-squared	0.497771	S.D. dependent var		1.143322
S.E. of regression	0.810251	Sum squared resid		24.94724
F-statistic	6.175874	Durbin-Watson stat		2.292047
Prob(F-statistic)	0.000025			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.291204	Mean dependent var		-3.47E-18
Adjusted R-squared	0.123332	S.D. dependent var		0.922296
S.E. of regression	0.863551	Sum squared resid		28.33736
Durbin-Watson stat	2.248139			

c. Persamaan (iii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 Gnrt_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:20

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	0.371638	0.089366	4.158588	0.0002
POV?	-0.598605	0.079225	-7.555720	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.001617			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	0.001667			
_RIAU--C	0.000619			
_JAMBI--C	-0.001617			
_SUMSEL--C	-0.002664			
_BENGKULU--C	0.000998			
_LAMPUNG--C	0.001667			
Weighted Statistics				
R-squared	0.581631	Mean dependent var		-0.000140
Adjusted R-squared	0.482544	S.D. dependent var		1.095328
S.E. of regression	0.787918	Sum squared resid		23.59094
F-statistic	5.869887	Durbin-Watson stat		2.293117
Prob(F-statistic)	0.000042			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.376951	Mean dependent var		-3.47E-18
Adjusted R-squared	0.229387	S.D. dependent var		0.922296
S.E. of regression	0.809633	Sum squared resid		24.90923
Durbin-Watson stat	2.451311			

Lampiran 3. Hasil regresi data panel dengan metode *fixed effects* terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 5 Propinsi di Pulau Jawa

a. Persamaan (i) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 Incsh_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \epsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 11:54

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	0.212416	0.074038	2.869001	0.0087
POV?	-0.800295	0.063864	-12.53124	0.0000
Fixed Effects				
_JKT--C	0.000980			
_JABAR--C	-0.002646			
_JATENG--C	-0.002646			
_YOGYA--C	-0.001667			
_JATIM--C	-0.001334			
Weighted Statistics				
R-squared	0.808407	Mean dependent var		-0.001452
Adjusted R-squared	0.758426	S.D. dependent var		1.365214
S.E. of regression	0.671005	Sum squared resid		10.35569
Log likelihood	-20.24859	F-statistic		16.17435
Durbin-Watson stat	2.329272	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.530315	Mean dependent var		-0.001000
Adjusted R-squared	0.407789	S.D. dependent var		0.928742
S.E. of regression	0.714716	Sum squared resid		11.74883
Durbin-Watson stat	2.069263			

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Persamaan (ii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 11:55

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	-0.040067	0.082664	-0.484694	0.6325
POV?	-0.865467	0.066101	-13.09315	0.0000
Fixed Effects				
_JKT--C	0.001509			
_JABAR--C	-0.003109			
_JATENG--C	-0.003109			
_YOGYA--C	-0.001600			
_JATIM--C	-0.001376			
Weighted Statistics				
R-squared	0.763830	Mean dependent var		-0.001452
Adjusted R-squared	0.702220	S.D. dependent var		1.261919
S.E. of regression	0.688620	Sum squared resid		10.90654
Log likelihood	-21.85147	F-statistic		12.39788
Durbin-Watson stat	2.081350	Prob(F-statistic)		0.000003
Unweighted Statistics				
R-squared	0.490429	Mean dependent var		-0.001000
Adjusted R-squared	0.357498	S.D. dependent var		0.928742
S.E. of regression	0.744444	Sum squared resid		12.74653
Durbin-Watson stat	1.928212			

c. Persamaan (iii) : $LPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 Gnr_{it} + \beta_2 Pov_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 11:56

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	0.203716	0.074016	2.752340	0.0113
POV?	-0.794439	0.066790	-11.89467	0.0000
Fixed Effects				
_JKT--C	0.001664			
_JABAR--C	-0.002991			
_JATENG--C	-0.002991			
_YOGYA--C	-0.001667			
_JATIM--C	-0.001664			
Weighted Statistics				
R-squared	0.802348	Mean dependent var		-0.001425
Adjusted R-squared	0.750787	S.D. dependent var		1.348097
S.E. of regression	0.672987	Sum squared resid		10.41695
Log likelihood	-20.49149	F-statistic		15.56106
Durbin-Watson stat	2.356227	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.522635	Mean dependent var		-0.001000
Adjusted R-squared	0.398105	S.D. dependent var		0.928742
S.E. of regression	0.720536	Sum squared resid		11.94095
Durbin-Watson stat	2.066913			

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinieritas 26 Propinsi di Indonesia

- a. antara variabel Incsh dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :
- $$\text{Incsh}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: INCSH?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 07:20

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.267827	0.064251	-4.168437	0.0001
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.001220			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	-0.001667			
_RIAU--C	2.48E-18			
_JAMBI--C	-0.002113			
_SUMSEL--C	-0.000446			
_BENGKULU--C	-0.001220			
_LAMPUNG--C	-0.001667			
_JKT--C	0.002113			
_JABAR--C	-0.002113			
_JATENG--C	-0.002113			
_YOGYA--C	-1.42E-17			
_JATIM--C	-0.000446			
_BALI--C	-0.001220			
_NTB--C	-0.001667			
_NTT--C	0.000446			
_KALBAR--C	-0.001667			
_KALTENG--C	2.71E-17			
_KALSEL--C	0.000446			
_KALTIM--C	-0.000446			
_SULUT--C	-0.002113			
_SULTENG--C	-0.001667			
_SULSEL--C	0.000446			
_SULTRA--C	0.001667			
_MALUKU--C	-0.000446			
_PAPUA--C	2.48E-18			
Weighted Statistics				
R-squared	0.071797	Mean dependent var		-0.000605
Adjusted R-squared	-0.115282	S.D. dependent var		0.925467
S.E. of regression	0.977357	Sum squared resid		123.2244
F-statistic	0.383779	Durbin-Watson stat		1.684283
Prob(F-statistic)	0.996995			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.047631	Mean dependent var		-0.000577
Adjusted R-squared	-0.144319	S.D. dependent var		0.915627
S.E. of regression	0.979472	Sum squared resid		123.7583
Durbin-Watson stat	1.650389			

b. antara variabel Middle dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan

$$: \text{Middle}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: MIDDLE?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 07:21

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	0.223712	0.066718	3.353077	0.0010
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.003706			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	1.13E-17			
_RIAU--C	0.001667			
_JAMBI--C	0.002040			
_SUMSEL--C	0.000373			
_BENGKULU--C	-0.000373			
_LAMPUNG--C	1.45E-17			
_JKT--C	0.001294			
_JABAR--C	0.000373			
_JATENG--C	0.000373			
_YOGYA--C	0.001667			
_JATIM--C	0.002040			
_BALI--C	-0.000373			
_NTB--C	2.57E-17			
_NTT--C	-0.000373			
_KALBAR--C	0.001667			
_KALTENG--C	8.28E-18			
_KALSEL--C	-0.000373			
_KALTIM--C	0.000373			
_SULUT--C	0.002040			
_SULTENG--C	-6.21E-18			
_SULSEL--C	0.096294			
_SULTRA--C	0.106667			
_MALUKU--C	0.002040			
_PAPUA--C	-0.001667			

Weighted Statistics

R-squared	0.050912	Mean dependent var	0.008325
Adjusted R-squared	-0.140377	S.D. dependent var	0.923816
S.E. of regression	0.986528	Sum squared resid	125.5477
F-statistic	0.266154	Durbin-Watson stat	2.171147
Prob(F-statistic)	0.999877		

Unweighted Statistics

R-squared	0.030535	Mean dependent var	0.008333
Adjusted R-squared	-0.164861	S.D. dependent var	0.916035
S.E. of regression	0.988665	Sum squared resid	126.0920
Durbin-Watson stat	2.140308		

c. antara variabel Gnrt dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :

$$\text{Gnrt}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: GNRT?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 07:19

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.263015	0.067333	-3.906176	0.0002
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.001228			
_SUMUT--C	9.73E-18			
_SUMBAR--C	4.55E-17			
_RIAU--C	-0.001667			
_JAMBI--C	0.001228			
_SUMSEL--C	-0.000438			
_BENGKULU--C	0.000438			
_LAMPUNG--C	-1.70E-17			
_JKT--C	-0.001228			
_JABAR--C	-0.000438			
_JATENG--C	-0.000438			
_YOGYA--C	-6.50E-17			
_JATIM--C	0.001228			
_BALI--C	0.000438			
_NTB--C	-0.001667			
_NTT--C	0.000438			
_KALBAR--C	-2.34E-17			
_KALTENG--C	-9.73E-18			
_KALSEL--C	0.000438			
_KALTIM--C	-0.002105			
_SULUT--C	-0.000438			
_SULTENG--C	4.43E-17			
_SULSEL--C	0.000438			
_SULTRA--C	3.21E-17			
_MALUKU--C	0.001228			
_PAPUA--C	2.43E-18			

Weighted Statistics

R-squared	0.069205	Mean dependent var	-1.63E-05
Adjusted R-squared	-0.118397	S.D. dependent var	0.926207
S.E. of regression	0.979504	Sum squared resid	123.7662
F-statistic	0.368894	Durbin-Watson stat	1.469593
Prob(F-statistic)	0.997817		

Unweighted Statistics

R-squared	0.043028	Mean dependent var	8.54E-18
Adjusted R-squared	-0.149850	S.D. dependent var	0.915850
S.E. of regression	0.982075	Sum squared resid	124.4168
Durbin-Watson stat	1.443494		

Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinieritas 8 Propinsi di Pulau Sumatera

- a. antara variabel Incsh dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :
- $$\text{Incsh}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: INCSH?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:40

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Sid. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.180251	0.127283	-1.416144	0.1647
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.001366			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	-0.001667			
_RIAU--C	1.67E-18			
_JAMBI--C	-0.001967			
_SUMSEL--C	-0.000300			
_BENGGKULU--C	-0.001366			
_LAMPUNG--C	-0.001667			
Weighted Statistics				
R-squared	0.032516	Mean dependent var		-0.000838
Adjusted R-squared	-0.165942	S.D. dependent var		0.928285
S.E. of regression	1.002351	Sum squared resid		39.18360
F-statistic	0.163843	Durbin-Watson stat		1.720080
Prob(F-statistic)	0.994441			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.016887	Mean dependent var		-0.000833
Adjusted R-squared	-0.184777	S.D. dependent var		0.922651
S.E. of regression	1.004282	Sum squared resid		39.33472
Durbin-Watson stat	1.685914			

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

- b. antara variabel Middle dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan
: $Middle_{it} = \beta_0 + \beta_1 Pov_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: MIDDLE?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:41

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	0.375959	0.119623	3.142861	0.0032
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.003960			
_SUMUT--C	-0.001667			
_SUMBAR--C	6.33E-18			
_RIAU--C	0.001667			
_JAMBI--C	0.002293			
_SUMSEL--C	0.000627			
_BENGKULU--C	-0.000627			
_LAMPUNG--C	2.43E-17			
Weighted Statistics				
R-squared	0.141580	Mean dependent var		0.000689
Adjusted R-squared	-0.034506	S.D. dependent var		0.953828
S.E. of regression	0.970144	Sum squared resid		36.70602
F-statistic	0.804040	Durbin-Watson stat		2.087339
Prob(F-statistic)	0.602866			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.053473	Mean dependent var		0.000625
Adjusted R-squared	-0.140686	S.D. dependent var		0.922269
S.E. of regression	0.985010	Sum squared resid		37.83956
Durbin-Watson stat	2.033745			

c. antara variabel Gnrt dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :

$$\text{Gnrt}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: GNRT?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:41

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.128503	0.127419	-1.008509	0.3194
Fixed Effects				
_ACEH--C	0.001452			
_SUMUT--C	4.76E-18			
_SUMBAR--C	4.12E-17			
_RIAU--C	-0.001667			
_JAMBI--C	0.001452			
_SUMSEL--C	-0.000214			
_BENGKULU--C	0.000214			
_LAMPUNG--C	-8.32E-18			
Weighted Statistics				
R-squared	0.016514	Mean dependent var		0.000196
Adjusted R-squared	-0.185227	S.D. dependent var		0.925671
S.E. of regression	1.007761	Sum squared resid		39.60771
F-statistic	0.081856	Durbin-Watson stat		1.538082
Prob(F-statistic)	0.999531			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.009075	Mean dependent var		0.000208
Adjusted R-squared	-0.194192	S.D. dependent var		0.922973
S.E. of regression	1.008616	Sum squared resid		39.67496
Durbin-Watson stat	1.534366			

Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinieritas 5 Propinsi di Pulau Jawa

- a. antara variabel Incsh dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :

$$\text{Incsh}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: INCSH?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 12:15

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.249290	0.142139	-1.753843	0.0922
Fixed Effects				
_JKT--C	0.002082			
_JABAR--C	-0.002082			
_JATENG--C	-0.002082			
_YOGYA--C	-1.39E-17			
_JATIM--C	-0.000415			
Weighted Statistics				
R-squared	0.062316	Mean dependent var		-0.000403
Adjusted R-squared	-0.133035	S.D. dependent var		0.936085
S.E. of regression	0.996407	Sum squared resid		23.82786
Log likelihood	-38.97143	F-statistic		0.318993
Durbin-Watson stat	1.861624	Prob(F-statistic)		0.896617
Unweighted Statistics				
R-squared	0.041617	Mean dependent var		-0.000333
Adjusted R-squared	-0.158046	S.D. dependent var		0.927602
S.E. of regression	0.998216	Sum squared resid		23.91444
Durbin-Watson stat	1.873922			

- b. antara variabel Middle dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan
: $\text{Middle}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: MIDDLE?
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 11/19/09 Time: 12:16
Sample: 1 6
Included observations: 6
Number of cross-sections used: 5
Total panel (balanced) observations: 30
One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	0.095302	0.144377	0.660090	0.5155
Fixed Effects				
_JKT--C	0.001508			
_JABAR--C	0.000159			
_JATENG--C	0.000159			
_YOGYA--C	0.001667			
_JATIM--C	0.001826			

Weighted Statistics

R-squared	0.009076	Mean dependent var	0.000985
Adjusted R-squared	-0.197367	S.D. dependent var	0.930113
S.E. of regression	1.017769	Sum squared resid	24.86050
Log likelihood	-39.73500	F-statistic	0.043963
Durbin-Watson stat	2.292031	Prob(F-statistic)	0.998728

Unweighted Statistics

R-squared	0.006955	Mean dependent var	0.001000
Adjusted R-squared	-0.199929	S.D. dependent var	0.929235
S.E. of regression	1.017896	Sum squared resid	24.86671
Durbin-Watson stat	2.294302		



- c. antara variabel Gnrt dengan variabel Pov dengan persamaan regresi bantuan :
- $$\text{Gnrt}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dependent Variable: GNRT?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 12:16

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POV?	-0.321133	0.144610	-2.220690	0.0361
Fixed Effects				
_JKT--C	-0.001131			
_JABAR--C	-0.000535			
_JATENG--C	-0.000535			
_YOGYA--C	-6.61E-17			
_JATIM--C	0.001131			
Weighted Statistics				
R-squared	0.103292	Mean dependent var		1.28E-05
Adjusted R-squared	-0.083522	S.D. dependent var		0.939920
S.E. of regression	0.978385	Sum squared resid		22.97371
Log likelihood	-38.37093	F-statistic		0.552912
Durbin-Watson stat	1.524533	Prob(F-statistic)		0.734641
Unweighted Statistics				
R-squared	0.076900	Mean dependent var		0.000000
Adjusted R-squared	-0.115412	S.D. dependent var		0.928105
S.E. of regression	0.980200	Sum squared resid		23.05903
Durbin-Watson stat	1.502960			

Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park untuk 26 Propinsi di Indonesia

a. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Incsh}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 08:51

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	-0.043162	0.069362	-0.622281	0.5349
POV?	0.255059	0.069349	3.677909	0.0003
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.574154			
_SUMUT--C	-1.063382			
_SUMBAR--C	-2.068646			
_RIAU--C	-1.055934			
_JAMBI--C	-1.165963			
_SUMSEL--C	-1.425893			
_BENGKULU--C	-0.449486			
_LAMPUNG--C	-0.574911			
_JKT--C	-0.715604			
_JABAR--C	-1.482884			
_JATENG--C	-1.001398			
_YOGYA--C	-0.710847			
_JATIM--C	-1.049738			
_BALI--C	-1.131601			
_NTB--C	-1.245639			
_NTT--C	-1.110927			
_KALBAR--C	-0.264263			
_KALTENG--C	-0.848058			
_KALSEL--C	-0.033450			
_KALTIM--C	-0.050774			
_SULUT--C	-2.094372			
_SULTENG--C	-0.762891			
_SULSEL--C	-1.134993			
_SULTRA--C	-0.337900			
_MALUKU--C	-1.450325			
_PAPUA--C	-0.350745			
Weighted Statistics				
R-squared	0.257752	Mean dependent var		-1.036467
Adjusted R-squared	0.101184	S.D. dependent var		1.217432
S.E. of regression	1.154197	Sum squared resid		170.5179
F-statistic	1.646265	Durbin-Watson stat		2.617593
Prob(F-statistic)	0.035048			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.250728	Mean dependent var		-0.929054
Adjusted R-squared	0.092678	S.D. dependent var		1.224210
S.E. of regression	1.166102	Sum squared resid		174.0536
Durbin-Watson stat	2.597693			

b. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 08:50

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	0.030445	0.068556	0.444094	0.6577
POV?	0.252768	0.068484	3.690923	0.0003
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.574331			
_SUMUT--C	-1.063259			
_SUMBAR--C	-2.068574			
_RIAU--C	-1.055985			
_JAMBI--C	-1.165945			
_SUMSEL--C	-1.425897			
_BENGKULU--C	-0.449411			
_LAMPUNG--C	-0.574839			
_JKT--C	-0.715723			
_JABAR--C	-1.482816			
_JATENG--C	-1.001330			
_YOGYA--C	-0.710898			
_JATIM--C	-1.049793			
_BALI--C	-1.131525			
_NTB--C	-1.245567			
_NTT--C	-1.110923			
_KALBAR--C	-0.264241			
_KALTENG--C	-0.848058			
_KALSEL--C	-0.033446			
_KALTIM--C	-0.050778			
_SULUT--C	-2.094355			
_SULTENG--C	-0.762819			
_SULSEL--C	-1.137933			
_SULTRA--C	-0.341220			
_MALUKU--C	-1.450379			
_PAPUA--C	-0.350694			

Weighted Statistics

R-squared	0.249495	Mean dependent var	-1.033107
Adjusted R-squared	0.091185	S.D. dependent var	1.213488
S.E. of regression	1.156840	Sum squared resid	171.2997
F-statistic	1.575993	Durbin-Watson stat	2.610200
Prob(F-statistic)	0.049314		

Unweighted Statistics

R-squared	0.247474	Mean dependent var	-0.929054
Adjusted R-squared	0.088738	S.D. dependent var	1.224210
S.E. of regression	1.168631	Sum squared resid	174.8094
Durbin-Watson stat	2.595455		

c. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Gnrt}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID2?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 08:50

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	-0.078965	0.070031	-1.127572	0.2616
POV?	0.259303	0.070001	3.704263	0.0003
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.574087			
_SUMUT--C	-1.063310			
_SUMBAR--C	-2.068574			
_RIAU--C	-1.056066			
_JAMBI--C	-1.165752			
_SUMSEL--C	-1.425886			
_BENGKULU--C	-0.449421			
_LAMPUNG--C	-0.574839			
_JKT--C	-0.715815			
_JABAR--C	-1.482805			
_JATENG--C	-1.001319			
_YOGYA--C	-0.710847			
_JATIM--C	-1.049600			
_BALI--C	-1.131536			
_NTB--C	-1.245699			
_NTT--C	-1.110934			
_KALBAR--C	-0.264191			
_KALTENG--C	-0.848058			
_KALSEL--C	-0.033457			
_KALTIM--C	-0.050899			
_SULUT--C	-2.094293			
_SULTENG--C	-0.762819			
_SULSEL--C	-1.135001			
_SULTRA--C	-0.337972			
_MALUKU--C	-1.450186			
_PAPUA--C	-0.350745			

Weighted Statistics

R-squared	0.259868	Mean dependent var	-1.031224
Adjusted R-squared	0.103746	S.D. dependent var	1.209316
S.E. of regression	1.144868	Sum squared resid	167.7724
F-statistic	1.664523	Durbin-Watson stat	2.607218
Prob(F-statistic)	0.032021		

Unweighted Statistics

R-squared	0.258943	Mean dependent var	-0.929054
Adjusted R-squared	0.102626	S.D. dependent var	1.224210
S.E. of regression	1.159691	Sum squared resid	172.1452
Durbin-Watson stat	2.594248		

Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedatisitas dengan Uji Park untuk 8 Propinsi di Pulau Sumatera

a. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Incs}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 11/19/09 Time: 09:57
 Sample: 1 6
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 8
 Total panel (balanced) observations: 48
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	0.152306	0.082772	1.840062	0.0736
POV?	0.226732	0.082695	2.741792	0.0093
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.733285			
_SUMUT--C	-1.006298			
_SUMBAR--C	-0.466571			
_RIAU--C	-0.362379			
_JAMBI--C	-0.298051			
_SUMSEL--C	-1.223302			
_BENGKULU--C	-0.179719			
_LAMPUNG--C	-0.271883			

Weighted Statistics

R-squared	0.256098	Mean dependent var	-0.625037
Adjusted R-squared	0.079911	S.D. dependent var	0.992196
S.E. of regression	0.951727	Sum squared resid	34.41983
F-statistic	1.453557	Durbin-Watson stat	2.698352
Prob(F-statistic)	0.200694		

Unweighted Statistics

R-squared	0.197745	Mean dependent var	-0.567907
Adjusted R-squared	0.007737	S.D. dependent var	0.965133
S.E. of regression	0.961393	Sum squared resid	35.12247
Durbin-Watson stat	2.740373		



b. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 09:58

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	-0.171491	0.084435	-2.031049	0.0493
POV?	0.247511	0.084353	2.934219	0.0056
Fixed Effects				
_ACEH--C	-0.732425			
_SUMUT--C	-1.006837			
_SUMBAR--C	-0.466825			
_RIAU--C	-0.362093			
_JAMBI--C	-0.297985			
_SUMSEL--C	-1.223268			
_BENGKULU--C	-0.180007			
_LAMPUNG--C	-0.272136			

Weighted Statistics

R-squared	0.259139	Mean dependent var	-0.632599
Adjusted R-squared	0.083672	S.D. dependent var	0.992287
S.E. of regression	0.949867	Sum squared resid	34.28541
F-statistic	1.476855	Durbin-Watson stat	2.716780
Prob(F-statistic)	0.191781		

Unweighted Statistics

R-squared	0.205965	Mean dependent var	-0.567907
Adjusted R-squared	0.017904	S.D. dependent var	0.965133
S.E. of regression	0.956454	Sum squared resid	34.76258
Durbin-Watson stat	2.802997		

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

c. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Gnrt}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 11/19/09 Time: 09:59
 Sample: 1 6
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 8
 Total panel (balanced) observations: 48
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	0.157519	0.082380	1.912092	
POV?	0.229072	0.082426	2.779126	0.0634
Fixed Effects				0.0084
_ACEH--C	-0.733290			
_SUMUT--C	-1.006552			
_SUMBAR--C	-0.466825			
_RIAU--C	-0.362116			
_JAMBI--C	-0.298564			
_SUMSEL--C	-1.223299			
_BENGKULU--C	-0.179977			
_LAMPUNG--C	-0.272136			

Weighted Statistics			
R-squared	0.263977	Mean dependent var	-0.628173
Adjusted R-squared	0.089656	S.D. dependent var	0.994275
S.E. of regression	0.948658	Sum squared resid	34.19815
F-statistic	1.514312	Durbin-Watson stat	2.665067
Prob(F-statistic)	0.178195		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.193042	Mean dependent var	-0.567907
Adjusted R-squared	0.001921	S.D. dependent var	0.965133
S.E. of regression	0.964206	Sum squared resid	35.32835
Durbin-Watson stat	2.713161		

Lampiran 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park untuk 5 Propinsi di Pulau Jawa

a. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Incs}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 13:02

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCSH?	0.054861	0.098205	0.558636	0.5818
POV?	0.224499	0.098191	2.286345	0.0318
Fixed Effects				
_JKT--C	-0.748211			
_JABAR--C	-1.285789			
_JATENG--C	-1.243002			
_YOGYA--C	-1.164178			
_JATIM--C	-0.962843			
Weighted Statistics				
R-squared	0.739234	Mean dependent var		-1.750738
Adjusted R-squared	0.671208	S.D. dependent var		1.467227
S.E. of regression	0.841314	Sum squared resid		16.27960
Log likelihood	-24.61244	F-statistic		10.86694
Durbin-Watson stat	2.443654	Prob(F-statistic)		0.000009
Unweighted Statistics				
R-squared	0.146267	Mean dependent var		-1.080973
Adjusted R-squared	-0.076445	S.D. dependent var		0.860586
S.E. of regression	0.892875	Sum squared resid		18.33617
Durbin-Watson stat	2.603975			

b. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Middle}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID²?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 13:03

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MIDDLE?	-0.177576	0.111084	-1.598575	0.1236
POV?	0.265015	0.111238	2.382408	0.0259
Fixed Effects				
_JKT--C	-0.747891			
_JABAR--C	-1.285813			
_JATENG--C	-1.243026			
_YOGYA--C	-1.163882			
_JATIM--C	-0.962479			

Weighted Statistics

R-squared	0.604847	Mean dependent var	-1.421874
Adjusted R-squared	0.501764	S.D. dependent var	1.085599
S.E. of regression	0.766279	Sum squared resid	13.50522
Log likelihood	-24.54460	F-statistic	5.867553
Durbin-Watson stat	2.527458	Prob(F-statistic)	0.000790

Unweighted Statistics

R-squared	0.242665	Mean dependent var	-1.080973
Adjusted R-squared	0.045099	S.D. dependent var	0.860586
S.E. of regression	0.840956	Sum squared resid	16.26578
Durbin-Watson stat	2.602975		



c. persamaan regresi bantuan : $\text{Logresid}_{it}^2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Gnrt}_{it} + \beta_2 \text{Pov}_{it} + \varepsilon_{it}$

Dependent Variable: LOGRESID2?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 11/19/09 Time: 13:03

Sample: 1 6

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 5

Total panel (balanced) observations: 30

One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GNRT?	0.026394	0.097259	0.271382	0.7885
POV?	0.215045	0.097204	2.212319	0.0371
Fixed Effects				
_JKT--C	-0.748060			
_JABAR--C	-1.285896			
_JATENG--C	-1.243110			
_YOGYA--C	-1.164178			
_JATIM--C	-0.962903			
Weighted Statistics				
R-squared	0.772113	Mean dependent var		-1.863190
Adjusted R-squared	0.712664	S.D. dependent var		1.618996
S.E. of regression	0.867843	Sum squared resid		17.32249
Log likelihood	-24.69629	F-statistic		12.98783
Durbin-Watson stat	2.462864	Prob(F-statistic)		0.000002
Unweighted Statistics				
R-squared	0.131860	Mean dependent var		-1.080973
Adjusted R-squared	-0.094612	S.D. dependent var		0.860586
S.E. of regression	0.900377	Sum squared resid		18.64561
Durbin-Watson stat	2.608607			